



BADAN POM

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



021 - 4241646



Gedung F Timur Lantai 6



sekrerorenkeu@gmail.com

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SAMBUTAN



Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Terciptanya *good governance* dan *clean government* mendapatkan tempat yang sangat strategis dan berimplikasi pada seluruh unit dan warga organisasi termasuk Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam rangka turut serta menciptakan *good governance* dan *clean government* di lingkungan BPOM tersebut, Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2019 ini disusun. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada organisasi, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Sebagai unit yang mengkoordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan berupaya meletakkan dasar-dasar dan melaksanakan proses tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh suprasistem.

Perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir akan memudahkan proses pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan evaluasinya sebagai suatu mata rantai yang saling terkait. Transparansi dan akuntabilitas merupakan titik tolak dan fokus terciptanya *good governance* dan *clean government*. Karena itu, selain mengkoordinasi dan memfasilitasi proses perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan juga menyusun Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan yang memuat aturan-aturan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Pengendalian kegiatan diperlukan untuk menjamin bahwa target yang ditetapkan akan dapat dicapai dan masalah yang ditemui dapat diidentifikasi dan diselesaikan sedini mungkin. Selain itu, pengendalian terutama di tahap perencanaan bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan menjamin bahwa dana yang dialokasikan memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian kinerja organisasi. Lebih lanjut, pengendalian dapat digunakan sebagai *feedback* untuk perencanaan berikutnya.

Kemampuan manajemen tidak kalah pentingnya dengan kemampuan teknis terutama untuk menerjemahkan kebijakan dan arahan pimpinan agar menjadi program dan kegiatan prioritas. Untuk meningkatkan kapasitas SDM BPOM dalam bidang manajemen program dan kegiatan, Biro Perencanaan dan Keuangan secara terus

menerus dan berkesinambungan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas SDM bidang manajemen. SDM yang berkualitas diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan program sehingga sasaran dan tujuan organisasi tercapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Biro Perencanaan dan Keuangan serta dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja BPOM dari tahun ke tahun.

Jakarta, 20 Februari 2020



Antonius Tarigan
Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
SAMBUTAN	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR LAMPIRAN.....	IV
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL.....	VI
RINGKASAN EKSEKUTIF	VII
BAB I PENDAHULUAN	9
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	9
B. STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN.....	16
C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019	20
A.1 VISI	21
A.2 MISI.....	21
A.3 TUJUAN	22
A.4 SASARAN KEGIATAN.....	23
B. PERJANJIAN KINERJA 2019	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN.....	34
B. REALISASI ANGGARAN	57
BAB VI PENUTUP.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1	:	SK Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015 - 2019
Lampiran. 2	:	SK Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tentang Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015 - 2019
Lampiran. 3	:	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Biro Perencanaan dan Keuangan
Lampiran. 4	:	SK Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tentang Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Tahun 2019
Lampiran. 5	:	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Lampiran. 6	:	Pengukuran Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019
Lampiran. 7	:	Perbandingan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2019 Terhadap Target Renstra 2019
Lampiran. 8	:	Pengukuran Kinerja Kegiatan
Lampiran. 9	:	Pengukuran Efisiensi Kegiatan
Lampiran. 10	:	Pengukuran Capaian RAPK Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019
Lampiran. 11	:	Mapping Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan 2019

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan	16
Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Tingkat Pendidikan	19
Gambar 2. 1 Peta Strategi BSC Level 0 Badan POM	23
Gambar 2. 2 Peta Strategi BSC Level 1 Sekretaris Utama	23
Gambar 2. 3 Peta Strategi BSC Level 2 Biro Perencanaan dan Keuangan	24
Gambar 2. 4 Visi, Misi, dan Tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan	28

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1. 1 Isu Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan.....	12
Tabel 1. 2 Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Golongan.....	18
Tabel 1. 3 Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	18
Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2018 (OTK Lama)	29
Tabel 2. 2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)	29
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019	32
Tabel 2. 4 Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran	33
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019	34
Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Sasaran ke 1 : Meningkatnya Capaian RB BPOM Penguatan Akuntabilitas sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	36
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Sasaran ke 2: Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja.....	39
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Sasaran ke 3 : Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	41
Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Sasaran ke 4 : Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	43
Tabel 3. 6 Target dan Realisasi Sasaran ke 5 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	44
Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Sasaran ke 6 : Persentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	46
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Sasaran ke 7 : Persentase Dokumen Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Laporan Kinerja Yang Diselesaikan Tepat Waktu	48
Tabel 3. 9 Target dan Realisasi Sasaran ke 8 : Persentase Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	50
Tabel 3. 10 Target dan Realisasi Sasaran ke 9: Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan.....	52
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Tahun 2015,2016, 2017 dan 2018 terhadap Target Renstra 2019.....	53
Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan 2019	57
Tabel 3. 13 Perhitungan Efisiensi per Sasaran Kegiatan.....	60

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja tingkat eselon II wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai media evaluasi untuk melihat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan yang bermuara pada pencapaian visi dan misi BPOM. Dari hasil evaluasi dapat dilihat prioritas kegiatan yang harus diutamakan dalam perencanaan-perencanaan selanjutnya, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan sumber dana dibandingkan dengan tuntutan lingkungan strategis yang semakin berkembang.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan perwujudan akuntabilitas Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini memuat capaian kinerja selama tahun 2019 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2019. Biro Perencanaan dan Keuangan telah mengukur capaian kinerja sasaran kegiatan sesuai Revisi Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019 Nomor HK.02.02.213.02.19.0282A Tahun 2019. Revisi renstra tersebut didasarkan pada diterbitkannya Perka BPOM Nomor 26 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan visi dan misi BPOM, Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit pendukung, sesuai tugas dan fungsi pada OTK Baru mempunyai 9 Sasaran Kegiatan, yaitu : (1) Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019; (2) Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP; (3) Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan; (4) Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM, (5) Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran; (6) Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas; (7) Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu; (8) Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu; (9) Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019.

Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 9 Indikator dengan capaian IKU sebagai berikut :

1. Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas, dengan capaian 97,20%
2. Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM, dengan capaian 97,21%.
3. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan capaian 133,93%.
4. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM , dengan capaian 100%.
5. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran, dengan capaian 112,83%.
6. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas, dengan capaian 100%.
7. Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu, dengan capaian 100%.
8. Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu, dengan capaian 100%
9. Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan, 95,49%.

Dari kesembilan indikator diatas target tercapai, 1 indikator dengan kriteria sangat baik, 7 indikator dengan kriteria baik, 1 indikator berkriteria tidak dapat disimpulkan.

Pada tahun 2019 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 063.01.1.432731/2018 tanggal 5 Desember 2018. Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai anggaran senilai Rp.28.279.300.000,00 dengan capaian realisasi anggaran 96,88% yaitu senilai Rp27.396.350.057,00.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2019 untuk selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Perubahan Organisasi

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KB POM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Biro Perencanaan dan Keuangan adalah “melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan”.

Fungsi yang diselenggarakan untuk melaksanakan tugas tersebut yaitu :

- a. Pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman luar negeri;
- c. Pelaksanaan manajemen keuangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu : Bagian Rencana Strategis dan Organisasi, Bagian Program dan Anggaran, Bagian Keuangan, dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pada tahun 2017 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merestrukturisasi organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan presiden diatas BPOM menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pengganti Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KB POM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan organisasi dan tata kerja Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit eselon II dibawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas :

melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Penyiapan koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- d. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

3. Aspek Strategis

BPOM sesuai Perubahan OTK baru mempunyai 6 (enam) eselon I yang terdiri dari 4 (empat) eselon di bidang teknis yaitu Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Deputi III Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi IV Bidang Penindakan, 1 (satu) eselon 1 pendukung manajemen pelaksana teknis yaitu Sekretariat Utama dan 1 (satu) eselon satu yang berfungsi menyelenggarakan pengawasan internal BPOM yaitu Inspektorat Utama.

Berdasarkan Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, salah satu tahapan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga sesuai dengan fokus prioritas RPJMN.

Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinir penyusunan Renstra BPOM, Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II (pusat dan daerah) dan memastikan Renstra yang disusun telah sesuai dengan :

- a. Pedoman dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Badan Pengawas Pembangunan Nasional (Bappenas)) serta setiap kebijakan strategis BPOM tertuang didalamnya.
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
- c. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian.

Untuk mewujudkan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra perlu dilaksanakan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja yang mendukung sasaran strategis tersebut.

Dalam melakukan kegiatan harus didukung anggaran yang terlebih dahulu disusun Rencana Kerja Pemerintah, RENJA setiap Unit Kerja dan DIPA. Biro Perencanaan dan Keuangan mengawal proses perencanaan kegiatan tersebut dan memastikan pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja berjalan sesuai ketentuan. Biro Perencanaan dan Keuangan memonitor secara berkala pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RKP dan DIPA serta pelaporan capaian tersebut ke dalam sistem monev secara on line dan laporan kinerja BPOM.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah menyusun dan menyajikan laporan kinerja instansi pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dikelola. Laporan ini untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur dengan sasaran target kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi dasar bagi BPOM baik unit kerja Eselon I, unit kerja eselon II dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia untuk melaksanakan SAKIP.

Pada setiap akhir semester 1 dan akhir tahun anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinir penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan organisasi, sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas pelaksanaan tupoksi dan penggunaan anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinir penyusunan laporan kinerja BPOM. Laporan Kinerja merupakan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang perlu ditingkatkan agar nilai BPOM maksimal. Dalam rangka mencapai hal tersebut, setiap tahun Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan Bimbingan Teknis SAKIP dengan mengundang wakil dari setiap unit kerja pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan adanya Bimbingan Teknis SAKIP, diharapkan terjadi persamaan persepsi semua unit kerja pusat dan daerah terkait pelaksanaan, perhitungan dan pelaporan kinerja, yang dapat berdampak pada peningkatan nilai SAKIP BPOM.

4. Isu Strategis

Pada Tahun 2019, dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Isu Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan

Bagian	Isu Strategis		Tindak Lanjut
Perencanaan	1	Penyusunan Perencanaan Tahun 2020	Telah disepakati Renja BPOM 2020 yang tertuang dalam dokumen Hasil Pertemuan Tiga Pihak.
	2	Review target indikator kinerja kegiatan s.d. komponen dengan pagu indikatif/anggaran/ alokasi tahun 2020	Sudah dilakukan perbaikan atas hasil reviu Bappenas melalui Krisna sebagai tindak lanjut atas TM 3
	3	Penyusunan Renstra BPOM Tahun 2020-2024	Telah disusunnya Ranwal Renstra BPOM 2020-2024 yang direviu oleh Bappenas melalui Bilateral Meeting pada tanggal 17 September dan 29 Oktober 2019. Rancangan awal tersebut diperbaiki sesuai dengan masukan Bappenas menjadi Rancangan Renstra BPOM 2020-2024.
		Review kesesuaian Renstra Unit Kerja dengan Renstra BPOM 2020 - 2024 (termasuk cascading level 0 - level 4)	Proses penyusunan Renstra BPOM 2020-2024 bersifat iteratif dan belum ditetapkan secara definitif, namun demikian telah dilakukan proses review dan

Bagian	Isu Strategis		Tindak Lanjut
			perbaikan indikator kinerja dari level 0 BPOM sampai level Eselon II termasuk balai telah dilakukan secara simultan. Secara substansi telah dilakukan penyeselarasan antara Renstra BPOM dengan Renstra Unit Eselon I, satker termasuk balai utamanya dari sisi penetapan sasaran strategis, indikator, dan target. Mengingat Renstra BPOM 2020-2024 baru akan ditetapkan di Tahun 2020, sehingga untuk dokumen perencanaan tahunan (Renja) telah disusun sebelumnya, hal ini memungkinkan adanya perbedaan sasaran strategis/indikator/target dengan Renstra Definitif. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan revisi dokumen perencanaan terkait.
		Implementasi dan pengembangan sistem perencanaan berbasis elektronik (e-planning)	1. Telah dilakukan penyesuaian sistem dengan Peta Strategi (PS dalam dokumen Ranwal Renstra) dan Renja 2. Telah dilakukan pembahasan awal dengan Bappenas terkait KRISNA pada tanggal 18 November 2019
		Review Pedoman Penyusunan Penelaahan Renstra Tahun 2020-2024, RKT dan PK	Telah disusun draf Pedoman Penyusunan dan Review Pelaksanaan Renstra di lingkungan BPOM 2020-2024, RKT dan PK pada bulan September 2019.
Penganggaran	1	Pemenuhan kebutuhan anggaran pegawai	Dilakukan revisi penambahan anggaran terkait kekurangan anggaran diklat dasar CPNS dan belanja pegawai termasuk tunjangan kinerja
	2	konsep reward dan punishment	telah dibuat draft aturan terkait penentuan reward dan punishment pada satker

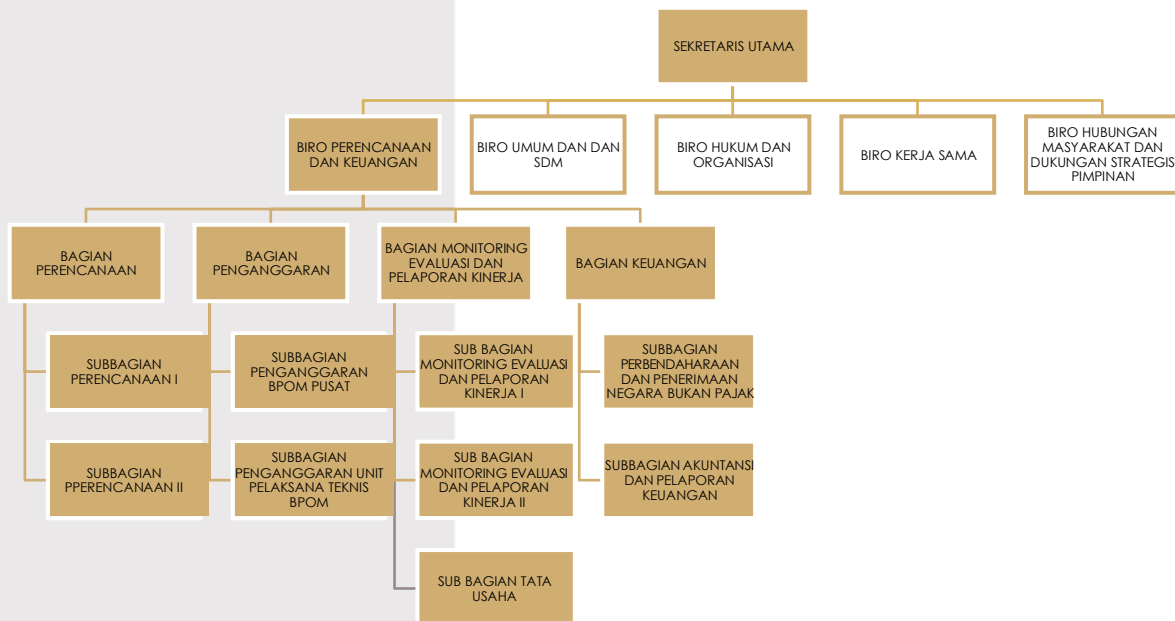
Bagian	Isu Strategis		Tindak Lanjut
	3	penetapan target penerimaan PNBPN yang realistis dan pembebanan target PNBPN pada satker Sektama	dilakukan revisi target penerimaan PNBPN pada tahun 2019 dan pembebanan target PNBPN Badan POM pada satker Sektama
	4	Perencanaan dan Penganggaran DAK pertama Badan POM	Telah diterbitkan DAK Pengawasan Obat dan Makanan, dan petunjuk operasional sedang dibahas pada tahap harmonisasi peraturan di Kementerian terkait
	5	Penyesuaian SBK output perkara pada Balai Besar/Balai POM	akan dibahas dan dilakukan penyesuaian pada SBK tahun anggaran 2021
	6	Pemenuhan anggaran gedung D	Telah dilakukan proses revisi dengan memanfaatkan kelebihan realisasi atas target penerimaan PNBPN
	7	Pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran	Sistem aplikasi telah mendukung proses revisi dan analisis anggaran
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	1	Pengembangan Manajemen Kinerja BPOM :	Membuat surat edaran permintaan peta strategi, target, dan DO yang sudah final.
	2	Penyusunan evaluasi akhir periode Renstra BPOM Tahun 2015-2019	Telah disusun dokumen evaluasi akhir periode Renstra BPOM 2015-2019
	3	Pemantauan Perjanjian Kinerja secara berkala	1. Pertemuan monev dengan Unit Kerja Pusat untuk memantau capaian kinerja dan anggaran setiap Triwulan 2. Permintaan data capaian kinerja dan anggaran BB/BPOM 3. Penyusunan Buku Kinerja BPOM dalam Angka
	4	Implementasi e-Performance BPOM	1. e-performance BPOM sudah diimplementasikan oleh seluruh unit kerja BPOM dari level 0 s.d. level IV 2. Menyempurnakan aplikasi e-performance dengan menambahkan menu pohon kinerja/peta indikator untuk menggambarkan turunan

Bagian	Isu Strategis		Tindak Lanjut
			kinerja dari level Badan POM sampai level eselon IV. 3. Telah dilaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi pengisian aplikasi e-performance pada tanggal 21 Oktober 2019 (monev TW III) dan 20 Desember 2019 (TW IV)
	5	Review Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Telah disusun Review Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
	6	Review Pedoman Evaluasi AKIP BPOM	Telah disusun draft Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM yang mencakup: a. perencanaan kinerja; b. pengukuran kinerja; c. pelaporan kinerja; d. evaluasi internal; e. capaian kinerja; f. evaluasi implementasi SAKIP; dan g. reviu atas laporan kinerja BPOM.
Keuangan	1	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	1. Dilakukan Bimtek dan FGD lebih intensif terhadap satker yang memiliki nilai EPA terendah 2. Menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran 3. Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker di lingkungan BPOM setiap Triwulan
	2	Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan agar tetap memperoleh opini WTP dari BPK	Review Perka Badan POM no. 12 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Badan POM dan telah dilaksanakan pembahasan internal BPOM dan pembahasan dengan Kementerian Keuangan, dengan output berupa

Bagian	Isu Strategis		Tindak Lanjut
			konsep Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan

B. STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Struktur Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi :



Gambar 1. 1
Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai 4 (empat) Bagian yaitu :

1. Bagian Perencanaan
2. Bagian Penganggaran
3. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
4. Bagian Keuangan

1. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang; dan

- b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyesuaian rencana tahunan atau jangka pendek
2. Bagian Penganggaran, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan dan analisis pinjaman dan hibah luar negeri.
3. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkungan BPOM; dan
 - b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
4. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan BPOM., Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan BPOM;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi BPOM; dan
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

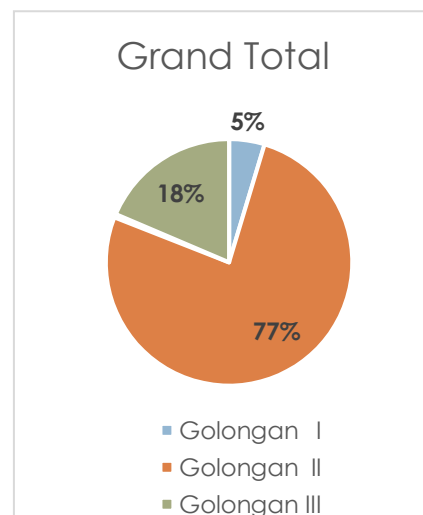
C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh 43 (tiga puluh delapan) orang pegawai, pada tahun 2019 Biro Perencanaan dan Keuangan mendapat tambahan 8 (delapan) orang CPNS. Berikut profil pegawai berdasarkan tingkat kepangkatan/Golongan seperti pada **Tabel 1.2**.

Tabel 1. 2
Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Golongan

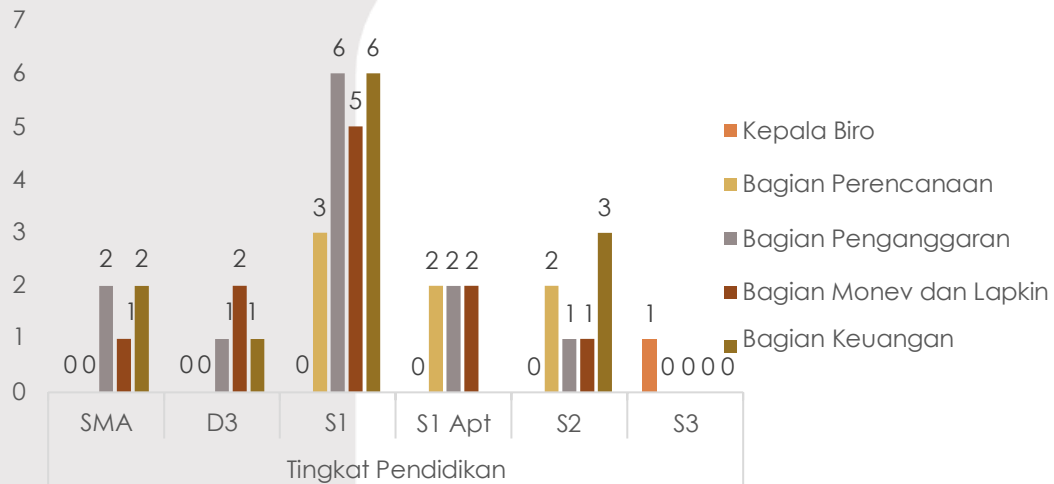
No	Nama Bagian	Golongan			Total
		II	III	IV	
1	Kepala Biro			1	1
2	Bagian Perencanaan		6	1	7
3	Bagian Penganggaran	1	9	2	13
4	Bagian Monev dan Lapkin	1	8	2	11
5	Bagian Keuangan		10	2	12
Grand Total		2	33	8	43



Dari **tabel 1.2** dapat diketahui bahwa pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan sebagian besar adalah Golongan III yaitu sebanyak 33 orang (77%).

Tabel 1. 3
Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Nama Bagian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SMA	D3	S1	S1 Apt	S2	S3	
1	Kepala Biro						1	1
2	Bagian Perencanaan			3	2	2		7
3	Bagian Penganggaran	2	1	6	2	1		12
4	Bagian Monev dan Lapkin	1	2	5	2	1		11
5	Bagian Keuangan	2	1	6		3		12
		5	4	20	6	7	1	43



Gambar 1. 2
Grafik Jumlah Tingkat Pendidikan

Biro Perencanaan dan Keuangan selain memiliki ASN juga memiliki 26 orang tenaga pramubakti untuk memenuhi Gap ABK Biro Perencanaan dan Keuangan

2. Sarana dan Prasarana

Biro Perencanaan dan Keuangan telah didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain :

- 1) Ruang kerja yang terdiri atas Ruang Kepala Biro, Ruang Kepala Bagian dan Ruang, Kepala Subbagian serta ruang kerja staf.
- 2) Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.
- 3) Peralatan dan meubelair dan kelengkapan lain untuk melaksanakan tugas.
- 4) Ruang rapat dan ruang arsip

3. Anggaran

Anggaran yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2019 sebesar Rp28.279.300.000,00. Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2019 menurut aplikasi OMSPAN sebesar Rp27.396.350.057,00 (96,88%)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Perencanaan kinerja jangka waktu lima tahun pada periode RPJMN ke-3 telah dituangkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Rencana strategis (Renstra) merupakan upaya sistematis dan berkesinambungan yang diarahkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi melalui pencapaian sasaran strategis dalam rangka mengemban mandat yang diberikan pemerintah, dengan memperhatikan tantangan, peluang, potensi, dan kelemahan yang dihadapi dari lingkungan strategisnya. Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan Rencana Strategis 2015-2019 dengan Keputusan kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 01.02.211.05.15.1089 Tahun 2015 yang disusun mengacu pada Rencana Strategis Badan POM 2015-2019 dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan, Program Kerja dan Indikator Kinerja, sesuai tugas pokok dan fungsi.

REVISI RENSTRA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2015-2019

Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019 mengacu kepada Organisasi dan Tata Kerja baru yang merupakan amanat tindak lanjut dari Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Rencana Strategis K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamankan perubahan Rencana Strategis K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi K/L.

Revisi Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor HK.02.02.213.02.19.0282A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019. Revisi renstra tersebut didasarkan pada diterbitkannya Perka BPOM Nomor 26 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019

A.1 VISI

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit yang memiliki tugas dan fungsi di dalam melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan, perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan serta sasarannya sesuai dengan tugas dan fungsi. Mengingat Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi BPOM, maka visi Biro Perencanaan dan Keuangan yang akan dicapai sesuai Rencana Strategi periode 2015-2019 adalah sama dengan visi BPOM yaitu.

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Dengan visi tersebut, diharapkan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target Renstra BPOM 2015-2019.

A.2 MISI

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Biro Perencanaan dan keuangan adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Biro Perencanaan dan Keuangan. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan yang sesuai dengan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:

1

Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan Berbasis Risiko untuk Melindungi Masyarakat

2

Mendorong Kapasitas Dan Komitmen Pelaku Usaha Dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan Serta Memperkuat Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

3

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan BPOM

A.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan di Biro Perencanaan dan Keuangan, ditetapkan tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2015-2019 adalah:

Terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

Uraian tujuan:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit pendukung berperan memperlancar proses pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
2. Efektif adalah output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dapat menyasar pada fungsi/tujuan.
3. Efisien adalah penggunaan sumber daya yang paling optimal, penggunaan sumber daya sesuai dengan tujuan/kinerja yang diberikan.
4. Akuntabel merupakan kriteria pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan meningkatnya capaian Reformasi Birokrasi BPOM di Bidang Akuntabilitas serta meningkatnya nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM. Tujuan dan indikator Tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan :

Tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan:

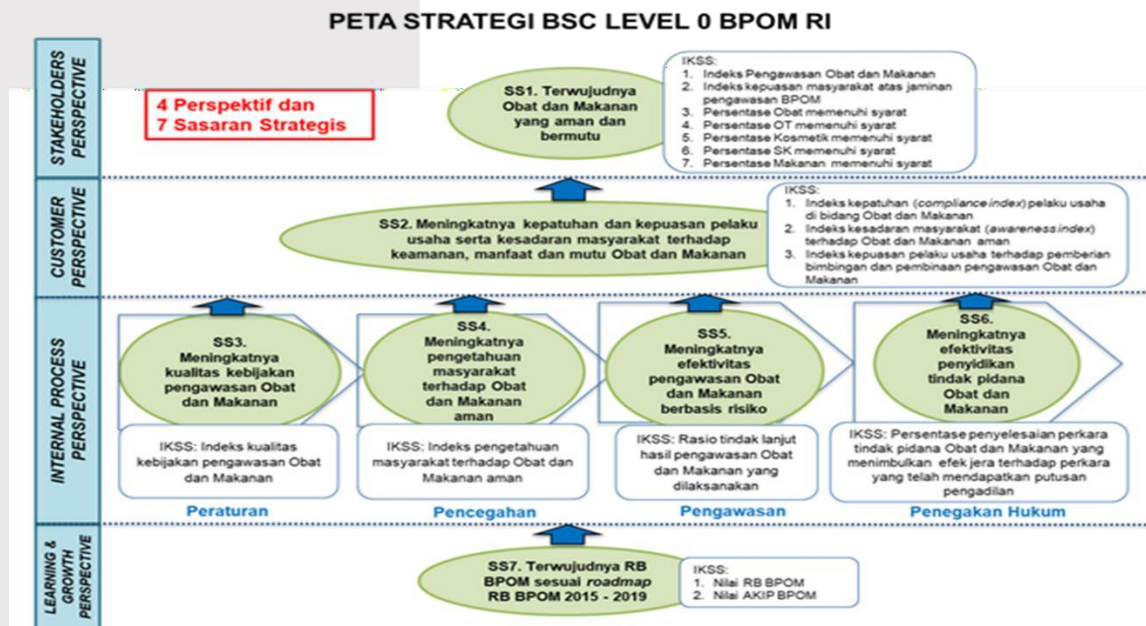
"Terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien"

Indikator Tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan

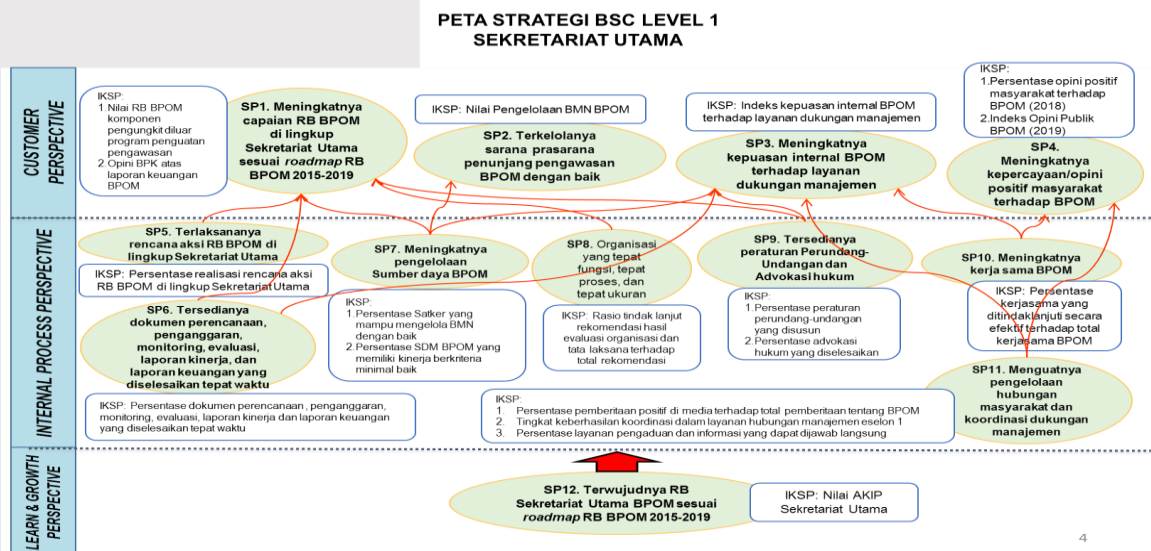
1. Meningkatnya capaian Reformasi Birokrasi BPOM di Bidang Akuntabilitas
2. Meningkatnya nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM

A.4 SASARAN KEGIATAN

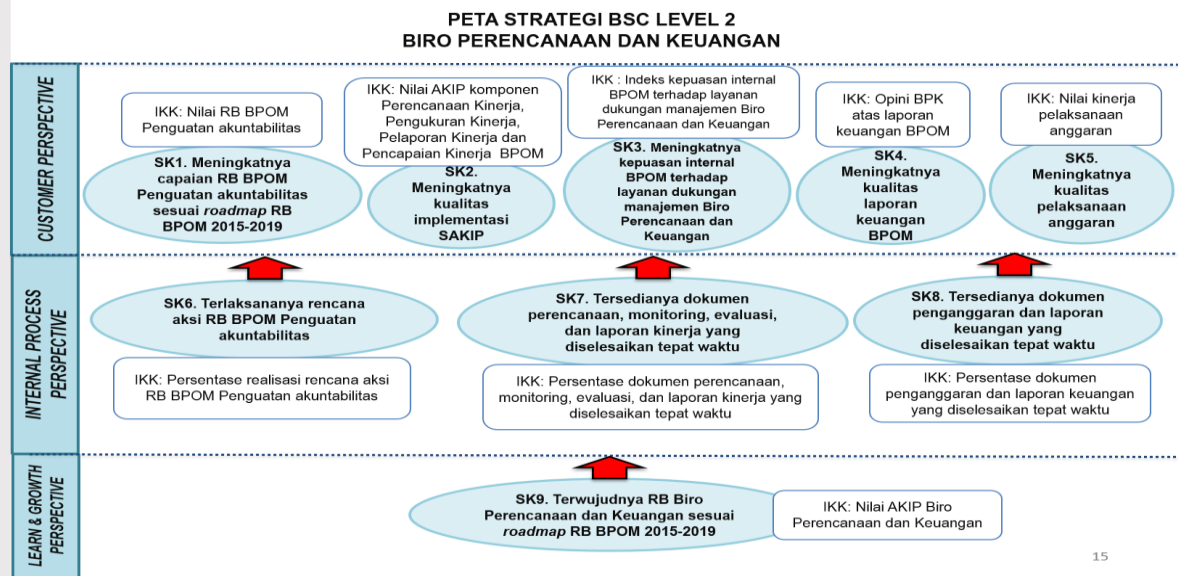
Sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan sumber daya yang dimiliki Biro Perencanaan dan Keuangan. Dalam kurun waktu dua tahun kedepan (2018-2019) diharapkan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat mencapai sasaran strategis level 2 Biro Perencanaan dan Keuangan yang diturunkan dari sasaran strategis level 0 BPOM dan level 1 Sekretaris Utama sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Peta Strategi BSC Level 0 Badan POM



Gambar 2. 2
Peta Strategi BSC Level 1 Sekretaris Utama



Gambar 2. 3
Peta Strategi BSC Level 2 Biro Perencanaan dan Keuangan

Dari peta strategi Biro Perencanaan dan Keuangan diatas, terdapat 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan yaitu :

1. Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dalam mendukung RB BPOM, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran dan tanggungjawab pada area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, **indikatornya** adalah **Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas** dengan target nilai 5 pada akhir periode Renstra Tahun 2019.

2. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan terbaru Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian AKIP terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal Kinerja dan (5) Pencapaian Kinerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya** adalah **Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM dengan** target 72,4 pada akhir tahun 2019.

3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan

Dalam sebuah organisasi, kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting tidak hanya untuk pelanggan eksternal tetapi juga untuk pelanggan internal. Pelayanan terhadap pelanggan internal menjadi sangat penting karena menentukan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kualitas pelayanan internal akan menjadi salah satu dasar dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika pelayanan terhadap pelanggan internal terhambat maka akan menghambat kinerja organisasi, demikian pula sebaliknya. Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon II dan UPT BPOM) di luar Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Rorenkeu.

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pengelolaan keuangan, berupaya memberikan layanan dukungan manajemen seoptimal mungkin untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan internalnya untuk mampu berkinerja sebaik mungkin.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya** adalah **indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan dengan** target 61 pada akhir tahun 2019.

4. Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM.

Laporan keuangan memiliki peranan sebagai penyedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan yang baik memiliki karakteristik kualitatif yaitu andal, relevan, dapat

dibandingkan dan dapat dipahami. Mulai tahun 2015 pemerintah menerapkan pelaporan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA: Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
- (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya adalah Opini BPK atas laporan keuangan BPOM dengan perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM pada tahun 2019.**

5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

12 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Pengelolaan UP, (4) Rekon LPJ Bendahara, (5) Data Kontrak, (6) Penyelesaian Tagihan, (7) Penyerapan Anggaran, (8) Retur SP2D, (9) Perencanaan Kas (Renkas), (10) Pengembalian/Kesalahan SPM, (11) Dispensasi Penyampaian SPM, (12) Pagu Minus

Metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada Lampiran Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-4547/PB.2/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Tentang Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Online Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya adalah Nilai kinerja pelaksanaan anggaran, dengan target 85,25 pada tahun 2019.**

6. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas.

Untuk mampu mencapai pemenuhan RB BPOM Penguatan Akuntabilitas diperlukan kepastian terhadap dilaksanakannya setiap rencana aksi RB yang telah ditetapkan dalam roadmap RB 2015-2019. Untuk itu, realisasi rencana aksi RB Penguatan Akuntabilitas tersebut menjadi hal yang wajib dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka

indikatornya adalah Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas, dengan target 100% pada tahun 2019.

7. Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu.

Kualitas RB dan SAKIP lembaga sangat erat kaitannya dengan siklus manajemen kinerja yaitu perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi serta pelaporan kinerja dan keuangan. Untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan BPOM, diperlukan perencanaan kinerja yang berkualitas disertai dengan penganggaran yang proporsional sehingga mampu menghasilkan program dan kegiatan yang berkualitas pula. Disamping itu, untuk peningkatan berkelanjutan diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala termasuk pelaporannya sebagai wadah perbaikan dan peningkatan kinerja pada perencanaan periode selanjutnya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya adalah Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada tahun 2019.**

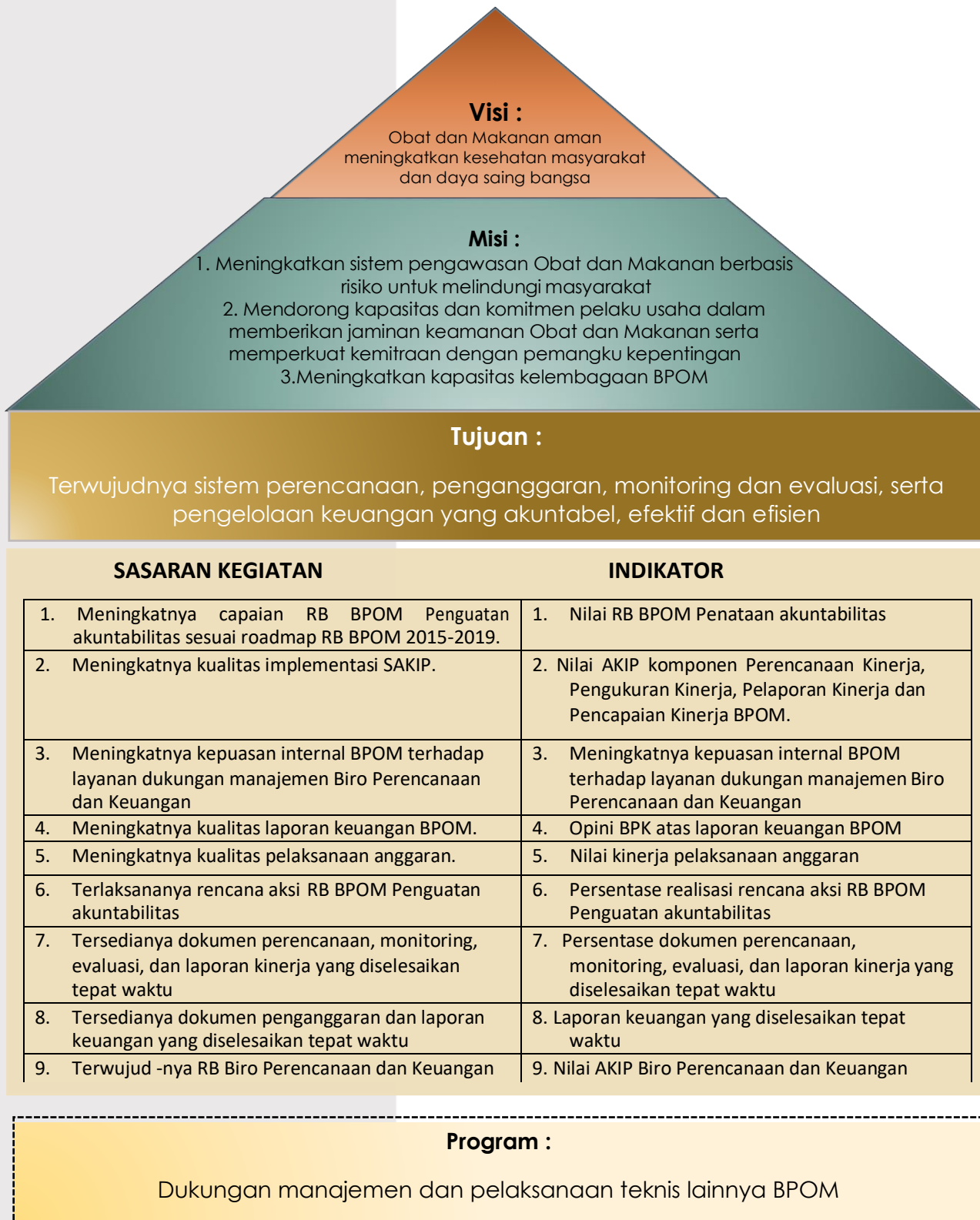
8. Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu.

Penganggaran dan laporan keuangan sebagai salah satu penentu kualitas RB dan SAKIP lembaga. BPOM sebagai K/L diwajibkan mencarar dan melaporkan setiap penggunaan keuangan Negara serta kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sangat berpengaruh terhadap nilai SAKIP BPOM. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya adalah Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100 % pada akhir 2019.**

9. Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019. Biro Perencanaan dan Keuangan selain mempunyai tugas terhadap pencapaian RB BPOM dan Sekretariat Utama, juga memiliki tanggungjawab terhadap pemenuhan RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai *roadmap* RB BPOM, dalam hal ini adalah terkait pemenuhan akuntabilitas kinerja tingkat entitas Satuan Kerja/Unit Organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemenuhan RB Biro Perencanaan dan Keuangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan manajemen kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka

indikatornya adalah Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan target 81 pada tahun 2019.

Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Program di Biro Perencanaan dan Keuangan setelah revisi Renstra Perubahan OTK.



Gambar 2. 4
Visi, Misi, dan Tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan perubahan OTK BPOM dan Penyusunan Peta Strategi berdasarkan *perspective balancescorecard* berikut sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam revisi Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019.

Tabel 2. 1
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2018 (OTK Lama)

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
		2015	2016	2017	2018
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	2	6	12	
	Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP minimal 75				3
	2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	40	40	41	
	3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	55	55	56	
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	15	15	15	
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1	1	1	

Tabel 2. 2
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u>	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,62	5

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019			
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	70	72,4
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	60	61
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u> Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75	85,25
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u> Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u> Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 9:</u> Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	78	81

Kesembilan indikator dari Sasaran Kegiatan pada Revisi Renstra 2015-2019 perubahan OTK B POM dijadikan sebagai IKU Biro Perencanaan dan Keuangan.

Indikator Kinerja Utama

Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Nilai RB B POM Penguatan Akuntabilitas
2. Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja B POM
3. Indeks kepuasan internal B POM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan
4. Opini BPK atas laporan keuangan B POM
5. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran
6. Persentase realisasi rencana aksi RB B POM Penguatan akuntabilitas
7. Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu
8. Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
9. Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan

B. PERJANJIAN KINERJA 2019

Perjanjian kinerja merupakan komitmen kepala unit kerja sebagai penerima amanah kepada atasannya dan kesepakatan antara penerima dengan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja dibuat berdasarkan Renstra, oleh karena itu Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran, indikator kinerja utama dan indikator yang relevan dan target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun melalui kegiatan dan anggaran yang disetujui pada tahun berjalan. Setelah DIPA Biro Perencanaan dan Keuangan disahkan, Biro Perencanaan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan ditetapkan oleh Sekretaris Utama Badan POM pada tanggal Januari 2019.

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 OTK Baru periode Maret s.d. Juli 2018 sesuai RENJA OTK Baru ditetapkan Biro Perencanaan dan Keuangan mengelola kegiatan Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja Pelaporan dengan anggaran sebesar 37.148.500.000,00. Kegiatan ini dijabarkan kedalam sub kegiatan yang dilaksanakan oleh keempat bagian yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan.

Tabel 2. 3
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5
2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72,4
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	61
4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85,25
6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM penguatan akuntabilitas	100%
7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%
8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019 mengelola kegiatan Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp28.279.300.000,00,-. Kegiatan ini dijabarkan kedalam sub kegiatan yang dilaksanakan oleh keempat bagian yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan.

A. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

- B. Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Sekretariat Utama, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	<50%	Sangat kurang
	$50\% \leq x < 70\%$	Kurang
	$70\% \leq x < 90\%$	Cukup
	$90\% \leq x < 110\%$	Baik
	$110\% \leq x < 120\%$	Sangat Baik
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra 2015-2019. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki 9 Sasaran Kegiatan yang masing-masing sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan 1 indikator kinerja, sehingga jumlah seluruhnya ada 9 Indikator kinerja.

Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2019 seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Capaian (%)	Kriteria
<i>Stakeholder Perspective</i>					
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5	4,86	97,20%	Baik
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72,4	70,38	97,21%	Baik
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro	61	81,7	133,93%	Tidak dapat disimpulkan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Capaian (%)	Kriteria
manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan dan Keuangan				
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u> Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	100%	Baik
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85,25	96,19	112,83%	Sangat Baik
Internal Perspective					
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u> Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100%	100%	100%	Baik
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Baik
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u> Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Baik
Learning and Growth Perspective					
<u>Sasaran Kegiatan 9:</u> Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81	77,35	95,49%	Baik

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa pada tahun 2019 kategori capaian Sasaran Kegiatan dengan kategori Sangat Baik 1 (satu), Baik ada 7 (baik), dan 1 (satu) Tidak dapat disimpulkan.

2. Analisis Capaian Sasaran Program

Analisis masing-masing Sasaran Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

2.1 Meningkatnya Capaian RB BPOM Penguatan Akuntabilitas sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019.

Sasaran Kegiatan ini di ukur menggunakan Indikator Kinerja **Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas**. Nilai RB diperoleh dari hasil penilaian RB yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB.

Tabel 3. 2
Target dan Realisasi Sasaran ke 1 :
Meningkatnya Capaian RB BPOM Penguatan Akuntabilitas sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)	Target 2019	Relisasi 2019 thd target 2019
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,35	4,35	4,61	4,64	5	4,86	97,20%	104,74%	5	97,20%

Nilai RB Penguatan Akuntabilitas berdasarkan nilai yang disampaikan oleh Kementerian PANRB pada tahun 2020 atas hasil Audit Reformasi Birokrasi tahun 2019 adalah 4,86. Apabila realisasi dibandingkan dengan target 2019 menunjukkan kriteria Baik (97,20%). Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 capaiannya 104,74%, apabila dibandingkan dengan target 2019 periode akhir renstra pencapaiannya 97,20%.

Berdasarkan rekomendasi upaya peningkatan terhadap keberhasilan pencapaian indikator pada Laporan Kinerja 2018 yaitu melakukan analisis hubungan/turunan kinerja pada level yang ada dibawahnya sampai ke unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu (*Cascading*) untuk rumusan hasil dan ukuran kinerja, serta dilengkapi dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), maka tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

- a. Bimtek SAKIP dan Monev Online, untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola data menginput aplikasi monev online (*e-performance*) dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
- b. Memantau pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
- c. Rapat Kerja Nasional, untuk membahas perencanaan program/kegiatan tahun 2020.
- d. Review target indikator kinerja kegiatan s.d. komponen dengan pagu indikatif/anggaran/ alokasi tahun 2020
- e. Monitoring dan evaluasi data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT secara berkala
- f. Mengembangkan Manajemen Kinerja BPOM, dengan melakukan mapping anggaran per indikator dari level 0 sampai dengan level 4.
- g. Rapat Evaluasi Nasional untuk membahas Evaluasi capaian program/kegiatan tahun 2019.
- h. Reviu Pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BPOM
- i. Penyusunan evaluasi akhir periode Renstra BPOM Tahun 2015-2019

Indikator Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas berlanjut menjadi Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan pencapaian indikator komponen penguatan akuntabilitas antara lain:

- a. Membakukan formula pengukuran seluruh Indeks yang ada agar dapat di uji relevansi antara angka Indeks yang dihasilkan dengan Sasaran Kinerja yang ingin diwujudkan;
- b. Indikator persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat sebaiknya tidak dicantumkan pada Level BPOM dan Deputi, melainkan cukup pada level Direktorat atau Kepala Balai Besar/Balai;
- c. Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Deputi Penindakan, dengan memindahkan Sasaran 2 s.d sasaran 6 ke masing-masing direktorat, sehingga yang menjadi kinerja Deputi hanya Sasaran 1 “Menurunnya Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan” karena sasaran ini sudah merupakan hasil komposit dari seluruh sasaran No. 2 s.d 6. , sedangkan sasaran 7 dipertahankan sebagai bentuk sumbangsih deputi penindakan dalam penataan penerapan akuntabilitas kinerja di unitnya.

Indikator Kinerja **Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas** harus terus dilaksanakan untuk dapat meningkatkan nilai RB BPOM, sehingga dapat menunjukkan BPOM dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

2.2 Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP

Sasaran Kegiatan ini di ukur menggunakan indikator **Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja**. Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja adalah penilaian/evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB atas penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPOM dengan capaian 97,21% dengan kategori **BAIK**.

Tabel 3. 3
Target dan Realisasi Sasaran ke 2:
Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)	Target 2019	Realisasi 2019 thd target 2019
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	61,09	65,95	66,85	68,94	72,4	70,38	97,21%	97,95%	72,4	97,21%

Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja di nilai menggunakan nilai AKIP yang disampaikan oleh Kementerian PANRB Tahun 2020 untuk penilaian kinerja Tahun 2019 yaitu 70,38. Apabila dibandingkan dengan hasil penilaian AKIP BPOM Tahun 2019 untuk kinerja tahun 2018 oleh Kementerian PANRB nilai total **komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja** dengan nilai 68,94 capaian indikator adalah 97,95%. Apabila dibandingkan dengan Renstra tahun 2019 dengan target 72,4, maka capaian indikator adalah 97,21%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah :

- Mereviu dan menyusun sasaran strategis dan indikator kinerja utama organisasi dari level BPOM sampai level eselon II untuk perbaikan manajemen kinerja 2020-2024
- Pembangunan sistem informasi perencanaan penganggaran (e-SIPP), mengintegrasikan KRISNA dengan RKAKL

- Menyempurnakan aplikasi e-performance dengan menambahkan menu pohon kinerja/peta indikator untuk menggambarkan turunan kinerja dari level Badan POM sampai level eselon IV
- Penyusunan Laporan Kinerja BPOM dengan tepat waktu yang menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*
- Penyusunan *draft* revisi Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan BPOM
- Review pedoman penyusunan LAPKIN di lingkungan BPOM
- Memantau capaian kinerja, melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut sesuai indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (Hal ini dilakukan dengan seluruh unit kerja eselon 2 di pusat (setiap 3 bulan) dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan reformasi birokrasi ke 33 BB/BPOM.
- Mereviu kesesuaian dokumen Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja

Indikator Kinerja ini tetap berlanjut untuk indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2020-2024, sehingga upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator pada tahun 2020 adalah

1. Finalisasi Peta Strategi dan Renstra BPOM Tahun 2020-2024
2. Penyempurnaan dan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi berbasis elektronik

Indikator **Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja** perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk menunjang peningkatan nilai RB BPOM (sama halnya dengan sasaran kegiatan no 1). Hal ini dapat diupayakan dengan melakukan koordinasi terus menerus dengan Kementerian PANRB dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya serta meningkatkan kemampuan staf pengelola data dalam melaporkan kinerja unitnya.

2.3 Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan indikator **Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan** (indikator baru).

Survei dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pelayanan yang telah diberikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan kepada unit kerja di lingkungan BPOM. Layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan meliputi Layanan Revisi DIPA/POK, Layanan Pencairan Anggaran serta Layanan Konsultasi terkait Perencanaan Kinerja, Penganggaran, Pencairan Anggaran, Penyusunan laporan keuangan serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

Survei berisi pertanyaan tentang layanan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan, serta sikap pegawai saat melayani. Penilaian dalam 5 skala yaitu nilai 1: Tidak Baik, nilai 2: Kurang Baik, nilai 3 : Cukup, nilai 4: Baik dan nilai 5 : Sangat Baik. Responden berasal dari unit kerja Pusat, BB/BPOM dan Loka POM (684 responden) dengan nilai rata-rata 81,7.

Tabel 3. 4
Target dan Realisasi Sasaran ke 3 :
Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)	Target 2019	Relisasi 2019 thd target 2019
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	79	61	81,7	133,93%	103,42%	61	133,93%

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa tahun 2019 realisasi melebihi target yang ditentukan sehingga masuk kategori Tidak dapat disimpulkan (133,93%).

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah :

- 1) Melakukan perkuatan koordinasi di Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilakukan melalui rapat koordinasi internal, komunikasi melalui telepon, e-mail, *whatsapp group*.
- 2) Membangun Bank Data Perencanaan BPOM yang merupakan system pendokumentasian berbasis digital terhadap dokumen-dokumen Perencanaan yang ada di BPOM dan dapat diakses terbatas oleh seluruh unit kerja BPOM
- 3) Membuat google sites Rorenkeu yang memuat kumpulan materi terkait kegiatan penganggaran dan untuk pengusulan dan revisi anggaran.
- 4) Menerima konsultasi masalah yang dihadapi unit kerja Pusat dan BB/BPOM terkait masalah penganggaran, perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan. Konsultasi dapat melalui tatap muka, komunikasi melalui telpon, *whatsapp* maupun email.

Indikator Kinerja ini tetap berlanjut untuk indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2020-2024, sehingga upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator pada tahun 2020 adalah

- 1) Melakukan kajian penetapan target untuk tahun 2020-2024, dengan realisasi tahun 2018 dan 2019 dijadikan sebagai baseline data.
- 2) Meningkatkan layanan bimbingan teknis, pendampingan dan layanan konsultasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan.
- 3) Mengembangkan bank data dan google sites untuk seluruh layanan yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan

Indikator Kinerja **Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan** harus tetap dipertahankan untuk menjadikan Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja yang mampu melayani sesuai dengan kebutuhan dan harapan unit kerja di lingkungan BPOM.

2.4 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan BPOM

Sasaran Kegiatan ini di ukur menggunakan indikator **Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM** atas pelaksanaan Anggaran Tahun sebelumnya yang diserahkan pada tahun berjalan.

Tabel 3. 5
Target dan Realisasi Sasaran ke 4 :
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)	Target 2019	Realisasi 2019 thd target 2019
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	WTP	100%

Pada tahun 2019 BPOM memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2018. BPOM telah meraih opini WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2014

Opini ini dicapai karena Laporan Keuangan BPOM Tahun 2018 telah disajikan secara wajar berdasarkan kriteria :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*)
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Apabila dibandingkan dengan Opini BPK pada tahun 2018 atas Laporan Keuangan BPOM tahun 2017 yaitu WTP, maka nilai capaiannya adalah 100%. Demikian halnya apabila dibandingkan dengan Renstra tahun 2019 dengan target WTP, maka nilai capaian indikator ini adalah 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempertahankan pencapaian target adalah :

- 1) Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan (pusat dan BB/BPOM).
- 2) Review kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- 3) Pelatihan Laporan Keuangan.
- 4) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM.

Untuk mempertahankan Opini WTP dari BPK, maka BPOM melakukan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Badan POM sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, berkaitan dengan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yaitu PNBP fungsional, Penerimaan PNBP Lainnya, Potongan Tunjangan Kinerja dalam Belanja Pegawai, Kesalahan Penganggaran, Pengelolaan Persediaan, Pengelolaan Aset Tetap, Pelaksanaan Belanja Barang dan Pelaksanaan Belanja Modal.

Indikator **Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM** tetap dipertahankan. Dengan mendapat opini WTP dari BPK, dapat meningkatkan citra BPOM sebagai institusi yang pertanggungjawaban keuangannya wajar dan akuntabel. Upaya kerjasama dengan BPK dan instansi terkait lainnya perlu terus ditingkatkan.

2.5 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sasaran Kegiatan ini di ukur menggunakan indikator **Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran** (indikator baru).

Tabel 3. 6
Target dan Realisasi Sasaran ke 5 :
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)	Target 2019	Relisasi 2019 thd target 2019
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	-	-	-	94,63	85,25	96,19	112,83%	101,65%	85,25	112,83 %

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

12 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1) Revisi DIPA, 2) Deviasi Halaman III DIPA, 3) Pengelolaan UP, 4) Rekon LPJ Bendahara, 5) Data Kontrak, 6) Penyelesaian Tagihan, 7) Penyerapan Anggaran, 8) Retur SP2D, 9) Perencanaan Kas (Renkas), 10) Pengembalian/Kesalahan SPM, 11) Dispensasi Penyampaian SPM, 12) Pagu Minus.

Pengukuran atas indikator ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Setiap Kementerian/Lembaga dan satker dapat memantau nilai IKPA secara periodik melalui aplikasi OMSPAN secara *online*.

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa realisasi indikator Nilai Kinerja Pelaksana Anggaran tahun 2019 dengan pencapaian 112,83% dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Apabila dibandingkan dengan hasil penilaian Kementerian Keuangan tahun 2018 tentang Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan nilai 94,63, maka capaiannya adalah 101,65%. Apabila dibandingkan dengan Renstra tahun 2019 dengan target 85,25, realisasinya adalah 112,83%. Hal ini menunjukkan, realisasi tahun 2019 telah melampaui target Renstra.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah :

- 1) Workshop penganggaran kegiatan terpadu pusat dan UPT Balai
- 2) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran TA 2018 dan Petunjuk Teknis Kegiatan Anggaran TA 2018.
- 3) Pemantapan mekanisme perencanaan dan penganggaran
- 4) Supervisi penganggaran bersama instansi terkait seperti dengan Kementerian Keuangan dan BAPPENAS
- 5) Koordinasi, evaluasi dan verifikasi tagihan belanja BPOM.
- 6) Pembinaan perbendaharaan Balai Besar/Balai POM.
- 7) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM
- 8) Penyusunan Pedoman Pembinaan Perbendaharaan.
- 9) Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.
- 10) Melaksanakan Koordinasi dengan Kementerian Keuangan atas Penilaian IKPA Badan POM
- 11) Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran tiap triwulan.

Indikator Kinerja ini tetap berlanjut untuk indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2020-2024, sehingga upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator pada tahun 2020 adalah menyusun langkah – langkah strategis implementasi pelaksanaan anggaran yang lebih optimal terutama terhadap indikator baru dan adanya reformulasi perhitungan penilaian IKPA.

2.6 Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas

Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan indikator **Persentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Penguatan Akuntabilitas**.

Tabel 3. 7
Target dan Realisasi Sasaran ke 6 :
Persentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Penguatan Akuntabilitas

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)	Target 2019	Realisasi 2019 thd target 2019
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	—	—	—	95,31%	100%	100,00%	100,00%	104,92%	100%	100,00%

Dari tabel tersebut di atas, pada tahun 2019 indikator ini terealisasi 100% dengan kategori **BAIK**.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah :

1. Mengembangkan manajemen kinerja, dengan mengembangkan e-performance sesuai dengan OTK baru yang diintegrasikan dengan e-SKP dan anggaran, sehingga tergambar anggaran berbasis kinerja, (dengan menggunakan jasa konsultan).

2. Rapat Kerja Nasional, untuk membahas perencanaan program/kegiatan tahun 2020.
3. Penyusunan Renstra BPOM Tahun 2020-2024
4. Review kesesuaian Renstra Unit Kerja dengan Renstra BPOM 2020 – 2024
5. Review target indikator kinerja kegiatan s.d. komponen dengan pagu indikatif/anggaran/ alokasi tahun 2020
6. Sosialisasi dan Bimtek SAKIP dan Monev Online, Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran
7. Monitoring dan evaluasi data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT secara berkala
8. Reviu Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan; Pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BPOM; serta reviu Kebijakan Akuntansi
9. Implementasi dan pengembangan sistem perencanaan berbasis elektronik (e- planning, e-budgeting, e-Performance BPOM, dan sistem Penatausahaan dan Pelaporan PNBK)
10. Rapat Evaluasi Nasional untuk membahas Evaluasi capaian program/kegiatan tahun 2019.
11. Penyusunan evaluasi akhir periode Renstra BPOM Tahun 2015-2019

Indikator Rencana aksi RB BPOM Penguatan Akuntabilitas tidak berlanjut pada Peta Strategi Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024, akan tetapi tahun 2020 tetap disusun roadmap RB Bidang Penguatan Akuntabilitas serta dievaluasi capaian rencana aksi setiap triwulan untuk mendukung tercapainya nilai RB BPOM.

2.7 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Laporan Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan ini di ukur menggunakan indikator **Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu.**

Tabel 3. 8
Target dan Realisasi Sasaran ke 7 :
Persentase Dokumen Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Laporan Kinerja
Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)	Target 2019	Realisasi 2019 thd target 2019
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	—	—	—	95,31%	100%	100%	100%	104,92%	100%	100%

Dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja meliputi:

- 1) Renstra BPOM/ Review Renstra/ Kajian Lingkungan Strategis
- 2) Renstra /Revisi Renstra/Review Renstra Sekretariat Utama
- 3) Renja BPOM tahun n+1
- 4) Rencana Kinerja Tahunan BPOM tahun n
- 5) Rencana Kinerja Tahunan Sekretaris Utama tahun n
- 6) Perjanjian Kinerja BPOM tahun n
- 7) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1
- 8) Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama tahun n.
- 9) Laporan Kinerja Sekretariat Utama n-1
- 10) Laporan Tahunan BPOM

Ketepatan waktu diukur berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan oleh batas waktu yang ditetapkan oleh suprasistem terkait. Pada tahun 2018, capaian indikator ini 100% dengan kategori **BAIK**.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target adalah

- 1) Reviu Grand Design Pengawasan Obat Dan Makanan
- 2) Reviu Indikator Kinerja Utama BPOM
- 3) Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra BPOM 2020-2024
- 4) Penyusunan Rancangan Renstra BPOM 2020-2024
- 5) Pertemuan Penyusunan Perencanaan Tahunan
- 6) Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018
- 7) Penyusunan Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2018
- 8) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2019 Di Surabaya

Indikator Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu tetap berlanjut menjadi Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2020-2024, untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator tersebut, pada tahun 2020 perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan aplikasi perencanaan terintegrasi (*e-planning*),
2. Finalisasi Penyusunan Rencana Strategi 2020-2024,
3. Pengembangan aplikasi *e-performance* yang terintegrasi.

Indikator **Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu** tetap dipertahankan, yang dapat menunjukkan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah unit kerja yang profesional dan berkinerja tinggi.

2.8 Tersedianya Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan ini di ukur menggunakan indikator **Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu** (indikator baru).

Tabel 3. 9
Target dan Realisasi Sasaran ke 8 :
Persentase Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan
Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)	Target 2019	Realisasi 2019 thd target 2019
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u> Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dokumen penganggaran dan laporan keuangan meliputi:

- 1) DIPA BPOM tahun n+1/ POK tahun n+1
- 2) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1
- 3) Laporan Keuangan BPOM Semester tahun n
- 4) Laporan Keuangan Sekretariat Utama tahun n-1
- 5) Laporan Keuangan Sekretariat Utama Semester Tahun n

Ketepatan waktu diukur berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan batas waktu yang diberikan oleh suprasistem terkait.

Realisasi indikator kinerja **Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu** tahun 2019 adalah 100% dengan target 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target adalah

- 1) FGD Laporan Keuangan Badan POM
- 2) Sosialisasi Dan Bimtek Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran
- 3) Sosialisasi Dan Bimtek Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran
- 4) Penyiapan Bahan Dan Pengawalan RDP Dengan Mitra Kerja Badan POM
- 5) Koordinasi Penganggaran Dengan Lintas Sektor
- 6) Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Dengan Stakeholder
- 7) Workshop Penganggaran Kegiatan Terpadu Pusat Dan UPT BPOM
- 8) Pertemuan Rekonsiliasi Hibah/Penganggaran dengan Stakeholder
- 9) Monitoring Kegiatan PNBK Di Balai POM Dalam Rangka Penyusunan Program PNBK 2019
- 10) Bimtek Kemandirian Loka POM
- 11) Sosialisasi Program DAK Badan Pom Ke Kabupaten/Kota

Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu yang diselesaikan tepat waktu tetap berlanjut menjadi Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2020-2024, untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator tersebut, pada tahun 2020 perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan Pengimplementasian Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPP)
- 2) Penyusunan Standar Biaya Keluaran
- 3) Mengintegrasikan aplikasi penatausahaan dan pelaporan PNBK dengan aplikasi web form, e-payment dan aplikasi layanan publik BPOM

2.9 Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019

Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan indikator **Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan**. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat/APIP BPOM atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan

Tabel 3. 10
Target dan Realisasi Sasaran ke 9:
Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)	Target 2019	Realisasi 2019 thd target 2019
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	61,58	71,45	72,17	73,38	81	77,35	95,49%	105,41%	81	95,49%

Berdasarkan penilaian AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan yang diterima tahun 2019 untuk kinerja tahun 2018 dari Inspektorat Utama dengan nilai 77,35 dengan capaian 95,49% dengan kategori **BAIK**.

Dari 5 komponen yang dinilai (dibandingkan nilai tahun 2018) mengalami kenaikan kecuali Perencanaan Kinerja. Untuk itu perlu perhatian terhadap komponen yang nilainya turun. Hal ini akan dilakukan perbaikan dalam Perencanaan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

Apabila nilai AKIP yang diterima tahun 2019 untuk kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan penilaian tahun 2018 untuk kinerja tahun 2017 adalah 73,38, maka capaiannya adalah 105,41%. Apabila dibandingkan dengan capaian akhir periode Renstra tahun 2019 dengan target 81, maka capaiannya adalah 95,49% berkategori Baik.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah:

- 1) Penyusunan Review Renstra, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai OTK Baru
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Penyusunan Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 4) Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka meningkatkan AKIP

- 5) Evaluasi kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan
- 6) Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan sesuai yang tercantum dalam rencana aksi perjanjian kinerja.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Capaian Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan:

- 1) Melakukan evaluasi internal terhadap program/kegiatan dan rencana aksi disertai kendala/hambatan.
- 2) Menyusun penjenjangan kinerja (cascading) dan menentukan ukuran kinerja organisasi hingga level individu.
- 3) Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja
- 4) Menyusun rencana aksi atas kinerja hingga mencantumkan sub kegiatan/komponen rini setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian angka.
- 5) Membangun komunikasi internal yang efektif dan efisien.

A. PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET 2019

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 11
Perbandingan Realisasi Tahun 2015,2016, 2017 dan 2018 terhadap Target Renstra 2019

Sasaran	Indikator	Targ et Rens tra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
			Realis asi	% Realis asi thdp targe t 2019	Realis asi	% Realis asi thdp targe t 2019	Realis asi	% Realis asi thdp targe t 2019	Realis asi	% Realis asi thdp targe t 2019	Realis asi	% Realis asi thdp targe t 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkat-nya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5	4,35	87%	4,35	87%	4,61	92%	4,64	93%	4,86	97,20%

RB BPOM 2015-2019												
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkat-nya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72,4	61,09	84%	65,95	91%	66,85	92%	68,94	95%	70,38	97,21%
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkat-nya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	61	-	-	-	-	-	-	79	130%	81,7	134%
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u> Meningkat-nya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Meningkat-nya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85,25	-	-	-	-	-	-	94,63	111%	96,19	113%
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u> Terlaksana-nya rencana aksi RB BPOM	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan	100%	-	-	-	-	-	-	94%	94%	100%	100%

Penguatan akuntabilitas	akuntabilitas												
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u> Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	
<u>Sasaran Kegiatan 9:</u> Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81	61,58	76%	71,45	88%	72,17	89%	73,38	91%	77,35	95%	

Dari tabel tersebut di atas terlihat 2 indikator baru yang realisasinya telah mencapai target Renstra tahun 2019, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target untuk indikator **Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan** serta **Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran**.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019 sesuai DIPA Satker Sekretaris Utama Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai anggaran senilai Rp.28.279.300.000,00. Untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan 61 (enam puluh satu) sub komponen pada tahun 2019. Berikut adalah realisasi netto tahun 2019 per sasaran strategis dan Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan :

Tabel 3. 12
Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Capaian (%)
<i>Stakeholder Perspective</i>							
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5	4,64	92,80%	3.215.567.000	3.120.321.453	97,04%
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72,4	69,5	95,99%	2.060.236.000	2.045.330.107	99,28%
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	61	81,7	133,93%	1.789.750.000	1.701.447.391	95,07%

Perencanaan dan Keuangan							
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u> Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	100%	5.154.621.000	5.071.877.561	98,39%
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85,25	96,19	112,83%	2.456.144.000	2.203.921.658	89,73%
Internal Perspective							
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u> Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100%	100%	100%	426.150.000	416.273.500	97,68%
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	5.371.484.000	5.259.247.100	97,91%
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u> Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	6.553.445.000	6.339.242.555	96,73%

Learning and Growth Perspective							
<u>Sasaran Kegiatan 9:</u>							
Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81	77,35	95,49%	1.251.903.000	1.238.688.732	98,94%

Realisasi anggaran netto Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2019 menurut aplikasi Monev DJA adalah Rp27.396.350.057 (96,88%). Terjadi kenaikan persentase realisasi dari tahun 2018 dan 2017 yaitu 89,35% dan 90,00.

C. ANALISI EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Meskipun pengukuran tingkat efisiensi kegiatan tidak diminta pada format Laporan Kinerja KemenPAN dan RB, namun Biro Perencanaan dan Keuangan tetap melakukan evaluasi tingkat efisiensi sub komponen yang dilaksanakan setiap

tahun. Rincian penghitungan efisiensi sub komponen tahun 2019 disampaikan pada lampiran Laporan Kinerja ini. Berikut informasi tingkat Efisiensi sub kegiatan :

Kategori Efisiensi	Jumlah sub Kegiatan
Ekstrem Efisien (TE> 0,5)	1
Efisien	60
Tidak Efisien	0

- Dari 61 sub komponen yang dilaksanakan pada tahun 2019, terhitung 61 sub komponen yang terhitung efisien.
- Terdapat 1 sub komponen yang Tingkat Efisiensinya lebih dari 0,5, antara lain :
 - Supervisi Penganggaran Bersama instansi terkait (TE = 0,67)

Berikut penghitungan Efisiensi per sasaran strategis/kegiatan yang diperoleh dari rata-rata Tingkat Efisiensi sub kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan:

Tabel 3. 13
Perhitungan Efisiensi per Sasaran Kegiatan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE (Indeks Efisen)	SE (Standar Efisen)	TE (Tingkat Efisen)	KATEGORI
			Input	Output				
1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	96,52%	100%	1,04	1	0,04	Efisien

2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	98,75%	100%	1,01	1	0,01	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	97,16%	98,94%	1,02	1	0,02	Efisien
4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	98,36%	100%	1,02	1	0,02	Efisien
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	90,09%	98,48%	1,09	1	0,09	Efisien
6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	97,39%	100%	1,03	1	0,03	Efisien
7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	97,64%	100%	1,02	1	0,02	Efisien
8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	92,82%	100%	1,08	1	0,08	Efisien
9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	98,60%	100%	1,01	1	0,01	Efisien



BAB VI

PENUTUP



BAB VI

PENUTUP

Tahun 2019 merupakan tahun ke lima atau periode terakhir masa pelaksanaan Rencana Strategis lima tahunan 2015-2019, maka pengukuran kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun ini harus mengacu kepada Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019 (dengan OTK baru). Pencapaian kinerja sasaran kegiatan di Biro Perencanaan dan Keuangan dengan :

1. Kriteria SANGAT BAIK untuk 1 (satu) sasaran kegiatan karena pencapaian indikator kisaran $110\% \leq x < 120\%$ dari target yaitu untuk sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran (112,83%).
2. Kriteria BAIK untuk 7 (tujuh) sasaran kegiatan karena pencapaian indikator masing-masing kisaran $90\% \leq x < 110\%$ dari target, yaitu :
 1. Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 (97,20%).
 2. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP (97,21%).
 3. Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM. Target WTP berhasil dicapai.
 4. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas (100%).
 5. Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu. Target 100% dokumen diselesaikan tepat waktu berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan batas waktu yang diberikan oleh suprasistem terkait.
 6. Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu. Target 100% dokumen yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan batas waktu yang diberikan oleh suprasistem terkait.
 7. Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 (94,08%).

3. Kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN untuk 1 (dua) sasaran kegiatan karena pencapaian indikator diatas 120% dari target, yaitu Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan (133,93%).

Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2019 adalah 96,88%. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 89,34%, namun masih lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu 90%.

Dari 61 sub komponen yang dilaksanakan pada tahun 2019, 60 sub komponen kegiatan yang terhitung efisien dan 1 sub komponen kegiatan tingkat efisiensinya > 0,5 yaitu Supervisi Penganggaran Bersama instansi terkait (TE = 0,67). Namun secara keseluruhan tingkat efisiensi sasaran kegiatan di Biro Perencanaan dan Keuangan Efektif dengan Rata-rata Tingkat Efisiensi 0,04

Dari penjelasan di atas, secara umum sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan telah tercapai. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator tersebut tidak tercapai 100% akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Diharapkan semua indikator kinerja Biro Perencanaan dan keuangan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka perbaikan kinerja dan antisipasi kemungkinan masalah yang akan dihadapi nantinya adalah:

1. Memanfaatkan secara optimal dokumen Akuntabilitas Kinerja yang telah disusun dengan baik yaitu Perencanaan Strategis (Renstra), Indikator Kinerja (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Renaksi).
2. Melakukan evaluasi internal terhadap program/kegiatan dan rencana aksi disertai kendala/hambatan hingga memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan yang telah disetujui untuk dilaksanakan
3. Menyusun penjenjangan kinerja (cascading) dan menentukan ukuran kinerja organisasi hingga level individu.
4. Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja.

5. Menyusun rencana aksi atas kinerja hingga mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
6. Meningkatkan koordinasi yang intensif baik antar Bagian di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun dengan unit lain di internal Badan POM.
7. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan suprasistem terkait antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BAPPENAS, Kementerian Bidang PMK, Komisi IX DPR RI dan sebagainya.
8. Meningkatkan kompetensi pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan melalui berbagai pelatihan atau kursus perencanaan dan manajemen.



LAMPIRAN - *LAMPIRAN*



BADAN POM





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INONESIA

NOMOR HK.04.03.213C.08.18.1829 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN NOMOR HK.04.211.05.15.1077 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

TAHUN 2015 - 2019

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Biro Perencanaan dan Keuangan, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perubahan Atas Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor HK.04.211.05.15.1077 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015 – 2019;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN NOMOR HK.04.211.05.15.1077 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN NOMOR
TAHUN 2015 - 2019

Kesatu : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perubahan Atas Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor HK.04.211.05.15.1077 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015 – 2019, diubah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Agustus 2018

**KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**


ANTONIUS TARIGAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN
DAN KEUANGAN NOMOR HK.
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
HK.01.211.05.15.1077 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2015 – 2019

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		BASELINE			TAHUN	
		2015	2016	2017	2018	2019
SK1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019					
IKK	Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas	-	4,35	4,61	4,62	5

DEFINISI

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan : (1) integritas tinggi; (2) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan (3) kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional.

Sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set), serta sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada : (1) kelembagaan (organisasi); (2) budaya organisasi; (3) ketatalaksanaan (sistem, proses, prosedur kerja yang efisien dan efektif); (4) deregulasi birokrasi (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif); (5) sumber daya manusia (SDM yang kompeten, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (6) pengawasan internal (akuntabilitas kinerja); dan (7) peningkatan kualitas pelayanan publik.

SUMBER DATA

Hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB

CARA MENGHITUNG

Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maximize	Seluruh Bagian dengan koordinator Bagian Monev Lapkin

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASELINE			TAHUN	
		2015	2016	2017	2018	2019
SK2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP					
IKK	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	61,09	65,95	66,85	70	72,4

DEFINISI

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan terbaru Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal Kinerja (15%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%);
 - b. Kualitas evaluasi (5%);
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5. Pencapaian Kinerja (20%), meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%);
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%);
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%).

SUMBER DATA

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPOM oleh KeMENPAN dan RB

CARA MENGHITUNG

- Penilaian dilakukan oleh KeMENPAN dan RB berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Penilaian dilakukan dengan menjumlahkan 4 (empat) komponen dari Nilai/Hasil Evaluasi AKIP BPOM yaitu komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai/angka dari Hasil Evaluasi SAKIP sesuai kriteria KemenPAN dan RB	Maximize	Seluruh Eselon I dikoordinir oleh Bagian Monev Lapkin



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		BASELINE		TAHUN		
		2015	2016	2017	2018	2019
SK3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan					
IKK	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	60	61

DEFINISI

- Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon II dan UPT BPOM) di luar Rorenkeu terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Rorenkeu.
- Layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan meliputi Layanan Revisi DIPA/POK, Layanan Pencairan Anggaran serta Layanan Konsultasi terkait Perencanaan Kinerja, Penganggaran, Pencairan Anggaran, Penyusunan laporan keuangan serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- Unit Kerja lain yang mendapatkan layanan tersebut meliputi Unit Kerja lain di bawah Satker Sekretariat Utama untuk Layanan Pencairan Anggaran dan Seluruh Unit Kerja untuk Layanan Revisi DIPA/POK dan Layanan Konsultasi.

SUMBER DATA

Hasil pengisian kuesioner survei kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan yang diisi oleh responden (Unit Kerja terkait).



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

CARA MENGHITUNG

- Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan.
- Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan.
- Capaian diperoleh dari hasil survey terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan, menggunakan kuisisioner dengan metode skala likert 1-5, dimana:
Nilai 1 : Tidak Baik
Nilai 2 : Kurang Baik
Nilai 3 : Cukup
Nilai 4 : Baik
Nilai 5 : Sangat Baik

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maximize	Seluruh Bagian, diukur oleh Sub Bag TU Rorenkeu

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		BASELINE			TAHUN	
		2015	2016	2017	2018	2019
SK4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM					
IKK	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

DEFINISI

- Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA: Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
- (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

- Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- (i) opini wajar tanpa pengecualian/WTP (unqualified opinion),
- (ii) opini wajar dengan pengecualian/WDP (qualified opinion),
- (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan
- (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)

SUMBER DATA

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK

CARA MENGHITUNG

Opini hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Badan POM atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya (n-1) yang diserahkan pada tahun berjalan (n)

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Opini	Maximize	Bagian Keuangan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		BASELINE			TAHUN	
		2015	2016	2017	2018	2019
SK5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran BPOM					
IKK	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran				75	85,25

DEFINISI

- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

- 12 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP
- 4) Rekon LPJ Bendahara
- 5) Data Kontrak
- 6) Penyelesaian Tagihan
- 7) Penyerapan Anggaran
- 8) Retur SP2D
- 9) Perencanaan Kas (Renkas)
- 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
- 11) Dispensasi Penyampaian SPM
- 12) Pagu Minus

- Metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada Lampiran Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-4547/PB.2/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Tentang Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Online Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

- IKPA terdapat pada aplikasi OMSPAN, Satker dapat memantau nilai IKPA secara periodik melalui OMSPAN masing-masing satker pada menu Monev PA. Nilai IKPA pada OMSPAN akan dirilis secara triwulanan

SUMBER DATA

Aplikasi OMSPAN dan Data pelaksanaan anggaran

CARA MENGHITUNG

- Metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada Lampiran Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-4547/PB.2/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Tentang Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Online Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

- Nilai kinerja pelaksanaan anggaran juga terdapat pada aplikasi OMSPAN

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maximize	Bagian Penganggaran

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		BASELINE			TAHUN	
		2015	2016	2017	2018	2019
SK6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas					
IKK	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	-	-	-	100%	100%

DEFINISI

Rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas merupakan rencana aksi program penguatan akuntabilitas yang terdapat pada roadmap RB 2015-2019 berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2015-2019.

SUMBER DATA

Hasil Monev RB Tahun berjalan

CARA MENGHITUNG

Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas = (Jumlah rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas yang terlaksana / Jumlah rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas pada tahun berjalan) x 100%

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen (%)	Maximize	Seluruh Bagian, dikoordinir oleh Bagian Monev Lapkin

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		BASELINE		TAHUN		
		2015	2016	2017	2018	2019
SK7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu					
IKK	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100%	100%

DEFINISI

- Dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja meliputi:

- 1) Renstra BPOM/ Review Renstra/ Kajian Lingkungan Strategis
- 2) Renstra Sekretariat Utama/Review Renstra Sekretariat Utama
- 3) Rencana Kinerja Tahunan BPOM tahun n
- 4) Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama tahun n
- 5) Renja BPOM tahun n+1
- 6) Perjanjian Kinerja BPOM tahun n
- 7) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1
- 8) Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama tahun n
- 9) Laporan Kinerja Sekretaris Utama n-1
- 10) Laporan Tahunan BPOM

- Tepat waktu berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan oleh deadline yang diberikan oleh suprasistem terkait.

SUMBER DATA

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

CARA MENGHITUNG

Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu = $\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan atau dihasilkan}} \times 100\%$

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maximize	Bagian Perencanaan dan Bagian Monev Lapkin, dikoordinir Sub Bag TU Rorenkeu

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		BASELINE			TAHUN	
		2015	2016	2017	2018	2019
SK8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu					
IKK	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100%	100%

DEFINISI

- Dokumen penganggaran dan laporan keuangan meliputi:

- 1) DIPA BPOM tahun n+1/ POK tahun n+1
- 2) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1
- 3) Laporan Keuangan BPOM Semester tahun n
- 4) Laporan Keuangan Sekretariat Utama tahun n-1
- 5) Laporan Keuangan Sekretariat Utama Semester Tahun n

- Tepat waktu berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan oleh deadline yang diberikan oleh suprasistem terkait.

SUMBER DATA

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

CARA MENGHITUNG

Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu = (Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan atau dihasilkan) x 100%

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maximize	Bagian Penganggaran dan Bagian Keuangan, dikoordinir Sub Bag TU Rorenkeu

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASELINE			TAHUN	
		2015	2016	2017	2018	2019
SK9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019					
IKK	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan			72,17	78	81

DEFINISI

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat/APIP BPOM atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Unit Organisasi di Lingkungan BPOM dalam hal ini adalah Biro Perencanaan dan Keuangan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan terbaru Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi SAKIP berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan BPOM.

Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
- Pelaporan Kinerja (15%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.213.02.19.0282A TAHUN 2019

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2015-2019, adanya perubahan Renstra K/L 2015-2019 dapat dilakukan sepanjang adanya perubahan struktur organisasi;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi dan tata kerja Badan POM terjadi perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM tentang Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

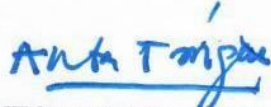
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2015-2019.**
- Pertama** : Menetapkan dan mengesahkan Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Kedua : Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum Kedua berfungsi sebagai:
- acuan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan;
 - dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan.
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan dilakukan :
- Pemantauan secara berkala; dan
 - Evaluasi tahun terakhir periode Rencana Strategis
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019

**KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**


ANTONIUS TARIGAN



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ir. Antonius Tarigan, M. Si
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt., M. P.
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2019

Pihak Kedua,
Sekretaris Utama,

Dra. Elin Herlina, Apt., M.P.
NIP 19670418 199203 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Dr. Ir. Antonius Tarigan, M. Si
NIP 19690403 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja berdasarkan Peta Strategi Revisi Renstra 2015-2019				
1	SK1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5
2	SK2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72.4
3	SK3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	61.00
4	SK4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
5	SK5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85.25
6	SK6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM penguatan akuntabilitas	100%
7	SK7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%
8	SK8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
9	SK9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan keuangan	81

Kegiatan :

Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Rp28,279,300,000
Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja
Pelaporan

Anggaran

Jakarta, 3 Januari 2019

Pihak Kedua
Sekretaris Utama,



Dra. Elin Herlina, Apt., M. P.
NIP. 19670418 199203 2 001

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M. Si
NIP. 19690403 199503 1 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.04.03.213C.01.19.0007

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2019

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

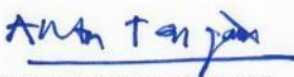
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2019.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2019;
- Kedua : Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN


ANTONIUS TARIGAN

Lampiran Keputusan Kepala Biro
Perencanaan dan Keuangan
Nomor : HK.04.03.213C.01.19.
Tentang Rencana Kinerja Biro
Perencanaan dan Keuangan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Tahun
2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5
2.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72,4
3.	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	61
4.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
5.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85.25
6.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100%
7.	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%
8.	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
9.	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Periode Januari s.d. Desember 2019

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
Stakeholder Perspective											
1	SK1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	*	*	*	5	*	*	*	4,86
2	SK2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	*	*	*	72	*	*	*	70,38
3	SK3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	*	*	*	61	*	*	*	81,70
4	SK4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM		WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP
5	SK5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85,25	85,25	85,25	85	93,47	93,19	95,53	96,19
Internal Perspective											
6	SK6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM penguatan akuntabilitas	20%	40%	60%	100%	25%	43%	66,39%	100%
7	SK7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	60	80	80	100%	60%	88%	94%	100%
8	SK8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	40	40	80	100%	40%	40%	80%	100%
Learning and Growth Perspective											
9	SK9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan keuangan	*	*	*	81	*	*	*	77,35

Ket : * Dilakukan di akhir tahun

PENGUKURAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
<i>Stakeholder Perspective</i>				
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5	4,86	97,20%
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72,4	70,38	97,20%
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	61	81,7	133,93%
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u> Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	100%
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85,25	96,19	112,83%
<i>Internal Perspective</i>				
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u> Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100%	100,00%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u> Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
<i>Learning and Growth Perspective</i>				
<u>Sasaran Kegiatan 9:</u> Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81	77,35	95,49%

Perbandingan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2019 Terhadap Target Renstra 2019

Sasaran	Indikator	Target Renstra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
			Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u>												
Meningkat-nya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5	4,35	87%	4,35	87%	4,61	92%	4,64	93%	4,86	97,20%
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u>												
Meningkat-nya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72,4	61,09	84%	65,95	91%	66,85	92%	68,94	95%	70,38	97,21%
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u>												
Meningkat-nya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	61	—	—	—	—	—	—	79	130%	81,7	134%
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u>												
Meningkat-nya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u>												
Meningkat-nya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85,25	—	—	—	—	—	—	94,63	111%	96,19	113%
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u>												
Terlaksana-nya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100%	—	—	—	—	—	—	94,31%	94%	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u>												
Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	—	—	—	—	—	—	100%	100%	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u>												
Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	—	—	—	—	—	—	100%	100%	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 9:</u>												
Terwujud-nya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81	61,58	76%	71,45	88%	72,17	89%	73,38	91%	77,35	95%

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

Tahun Anggaran : 2019

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN STRATEGIS	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	1.045.750.000	1.029.258.182	98,42%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Perencanaan Strategis yang dihasilkan	dokumen	1	1	100%
			RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	529.762.000	483.642.979	91,29%
				<u>Output :</u>				
				Rapat Kerja Nasional sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja BPOM Tahun	dokumen	1	1	100%
			WORKSHOP ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	662.830.000	657.044.165	99,13%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Laporan Workshop Anggaran dan Perbendaharaan	dokumen	1	1	100,00%
			SOSIALISASI DAN BIMTEK SAKIP DAN MONEV ONLINE	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	977.225.000	950.376.127	97,25%
				<u>Output :</u>				

				Jumlah Dokumen Bimtek Sakip Dan Monev Online yang Dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERINTEGRASI	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	201.570.000	192.545.600	95,52%
				<u>Output :</u>				
				Sistem informasi perencanaan (e-planning) BPOM disesuaikan dengan KRISNA dan manajemen kinerja	Sistem (aplikasi)	1	1	100%
			PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN POM TAHUN 2018	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	121.010.000	120.983.800	99,98%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Laporan Kinerja Badan POM Tahun 2018 yang Dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
			MONITORING DAN SUPERVISI PELAKSANAAN KEGIATAN BALAI BESAR/ BALAI	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	537.891.000	537.782.957	99,98%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Laporan Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan kegiatan BB/BPOM	BB/BPOM	33	33	100%
			MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	1.199.765.000	1.194.017.750	99,52%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan	Laporan	4	4	100%

3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	KOORDINASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN LINTAS SEKTOR	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	290.883.000	289.587.000	99,55%	
				<u>Output :</u>					
				Jumlah Laporan Koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan	Laporan	1	1	100%	
			INTERNALISASI KINERJA RORENKEU	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	436.800.000	424.438.440	97,17%	
				<u>Output :</u>					
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Internalisasi Rorenkeu	Laporan	1	1	100%	
			PEMANTAPAN MEKANISME PENGANGGARAN DI BB/BPOM	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	949.092.000,00	874.716.951,00	92,16%	
				<u>Output :</u>					
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di BB/BPOM	Laporan	47	45	96%	
4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	112.975.000,00	112.705.000,00	99,76%	
				<u>Output :</u>					
				Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan	Paket	1	1	100%	
4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	PELAKSANAAN BIMTEK SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (PUSAT	Input :					
				Dana	Rp	359.380.000,00	336.949.906,00	93,76%	
				Output :					
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimtek	Satker	16	16	100,00%	

			PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	Input :					
				Dana	Rp	2.551.851.000,00	2.516.452.670,00	98,61%	
				Output :					
				Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	Laporan	6	6	100,00%	
			FGD PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN PNBP FUNGSIONAL BPOM	Input :					
				Dana	Rp	645.962.000,00	630.689.788,00	97,64%	
				Output :					
				Jumlah Laporan FGD Penatausahaan dan Pelaporan PNBP	Laporan	1	1	100,00%	
			REVIEW KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Input :					
				Dana	Rp	218.270.000,00	215.594.200,00	98,77%	
				Output :					
				Usulan Juknis Akuntansi Persediaan	Dokumen	1	1	100,00%	
			HONOR PENGELOLA PNBP	Input :					
				Dana	Rp	176.976.000,00	176.060.000,00	99,48%	
				Output :					
				Jumlah Kegiatan Pengelola PNBP	Kegiatan	12	12	100,00%	
			REVISI PEDOMAN PENGELOLAAN PNBP	Input :					
				Dana	Rp	372.445.000,00	370.935.297,00	99,59%	
				Output :					
				Pedoman Revisi Pedoman Pengelolaan PNBP	Pedoman	1	1	100,00%	
			INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PNBP FUNGSIONAL	Input :					
				Dana	Rp	766.400.000,00	762.141.100,00	99,44%	
				Output :					

5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran		Laporan Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNPB Fungsional	Laporan	1	1	100,00%
			WORKSHOP LAPORAN KEUANGAN	Input :				
				Dana	Rp	63.337.000,00	63.054.600,00	99,55%
				Output :				
				Jumlah laporan keikutsertaan workshop	dokumen	1	1	100,00%
			KOORDINASI, EVALUASI DAN VERIFIKASI TAGIHAN BELANJA BADAN POM	Input :				
				Dana	Rp	562.718.000,00	523.733.177,00	93,07%
				Output :				
				Jumlah Laporan Koordinasi , Evaluasi Dan Verifikasi Tagihan Belanja Badan POM	Laporan	1	1	100,00%
			PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN	Input :				
				Dana	Rp	292.600.000,00	273.281.088,00	93,40%
				Output :				
				Jumlah BB/BPOM Pembinaan Perbendaharaan Balai Besar/ Balai POM	Laporan	15	15	100,00%
			KOORDINASI LINTAS SEKTOR BAGIAN KEUANGAN	Input :				
				Dana	Rp	28.260.000,00	26.180.000,00	92,64%
				Output :				
				Jumlah Pelaksanaan Koordinasi yang dilaksanakan	Laporan	12	12	100,00%
			EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN	Input :				
				Dana	Rp	208.880.000,00	204.785.138,00	98,04%
				Output :				

				Laporan FGD Pelaksan	Laporan	4	4	100,00%
			MONITORING KEGIATAN SATKER SEKRETARIAT UTAMA	Input :				
				Dana	Rp	95.480.000,00	93.869.404,00	98,31%
				Output :				
				Laporan Monitoring	Laporan	1	1	100,00%
			FGD EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN	Input :				
				Dana	Rp	202.204.000,00	177.196.126,00	87,63%
				Output :				
				Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	4	4	100,00%
			PENYUSUNAN JUKLAK DAN JUKNIS	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	246.950.000	243.897.500	98,76%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Anggaran 2019 dan Petunjuk Teknis Kegiatan 2019	Dokumen	2	2	100%
			KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	521.657.000	506.922.200	97,18%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran	Laporan	26	26	100%
			SUPERVISI PENGANGGARAN BERSAMA INSTANSI TERKAIT	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	297.395.000	154.057.025	51,80%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Laporan Supervisi Penganggaran Bersama Instansi Terkait	Laporan	22	19	86%
6	Terlaksananya rencana aksi RB	Persentase realisasi rencana aksi RB	PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	241.468.000	240.430.000	99,57%

	BPOM Penguatan Akuntabilitas	BPOM Penguatan Akuntabilitas	BPOM	<u>Output :</u>				
				Jumlah Paket Pengembangan Manajemen Kinerja BPOM	Paket	1	1	100%
			INTEGRASI PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	184.682.000	175.843.500	95,21%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Dokumen Integrasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	2	2	100%
7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Presentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	REVIU GRAND DESIGN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	251.400.000	239.030.801	95,08%
				<u>Output :</u>				
				Dokumen Review Grand Design Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2035	Dokumen	1	1	100%
			REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA BPOM	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	392.126.000	376.832.100	96,10%
				<u>Output :</u>				
				Dokumen laporan penyusunan Indikator Kinerja Utama BPOM	Dokumen	1	1	100%
			PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENSTRA BPOM 2020-2024	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	751.297.000	741.870.645	98,75%
				<u>Output :</u>				
				Rancangan Teknokratik Rencana Strategis BPOM 2020-2024	Dokumen	1	1	100%
			PENYUSUNAN	<u>Input :</u>				

			RANCANGAN RENSTRA BPOM 2020-2024	Dana	Rp	1.577.196.000	1.528.755.763	96,93%
				<u>Output :</u>				
				Rancangan Rencana Strategis BPOM 2020-2024	Dokumen	1	1	100%
			PERTEMUAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	479.940.000	453.692.832	94,53%
				<u>Output :</u>				
				Dokumen Rencana Kerja (Tahunan) sesuai dengan pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) antara BPOM, Bappenas, dan Kementerian Keuangan	Dokumen	3	3	100%
			PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2018	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	31.916.000	31.850.150	99,79%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018	Dokumen	1	1	100%
			PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BADAN POM TAHUN 2018	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	175.514.000	175.394.050	99,93%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Tahunan Badan Pom Tahun 2018	Dokumen	1	1	100%
			RAPAT EVALUASI NASIONAL TAHUN 2019 DI SURABAYA	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	1.712.095.000	1.711.820.759	99,98%
				<u>Output :</u>				

				Jumlah Laporan Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2019 Di Surabaya	Laporan	1	1	100%
8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Presentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	UNIT AKUNTANSI BADAN POM	Input :				
				Dana	Rp	193.357.000,00	175.094.000,00	90,55%
				Output :				
				Jumlah Kegiatan Unit	Kegiatan	12	12	100,00%
			FGD LAPORAN KEUANGAN BADAN POM	Input :				
				Dana	Rp	683.060.000,00	634.545.901,00	92,90%
				Output :				
				Jumlah Laporan Rapat FGD Laporan Keuangan	Laporan	27	27	100,00%
			SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL PAGU ANGGARAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	1.078.080.000,00	1.049.482.700,00	97,35%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Dokumen RKAK/L Pagu Anggaran 2020 satker Pusat dan Balai	Dokumen	40	40	100%
			SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL ALOKASI ANGGARAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	1.745.562.000,00	1.732.368.400,00	99,24%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Dokumen RKAK/L Alokasi Anggaran 2020 satker Pusat dan Balai	Dokumen	40	40	100%
			PENYIAPAN BAHAN DAN PENGAWALAN RDP DENGAN MITRA	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	165.110.000,00	150.908.500,00	91,40%
				<u>Output :</u>				

			KERJA BADAN POM	Jumlah Laporan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI	Laporan	5	5	100%
			KOORDINASI PENGANGGARAN DENGAN LINTAS SEKTOR	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	249.361.000,00	218.271.800,00	87,53%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Laporan Koordinasi Penganggaran dengan Lintas Sektor	Laporan	10	10	100%
			PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) DENGAN STAKEHOLDER	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	85.550.000,00	78.352.000,00	91,59%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Dokumen Standar Biaya Keluaran	Dokumen	1	1	100%
			WORKSHOP PENGANGGARAN KEGIATAN TERPADU PUSAT DAN UPT BPOM	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	1.066.190.000,00	1.053.122.570,00	98,77%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Laporan Workshop Penganggaran Kegiatan Terpadu Pusat dan UPT BPOM	Laporan	1	1	100%
			PERTEMUAN REKONSILIASI HIBAH/PENGANGGARAN DENGAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	268.482.000,00	260.943.500,00	97,19%
				<u>Output :</u>				
				Laporan Rekonsiliasi H	Laporan	4	4	100%
			MONITORING KEGIATAN PNBP DI BALAI POM DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROGRAM PNBP 2019	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	75.340.000,00	783.365.784,00	1039,77%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah laporan hasil monitoring PNBP di Balai	Laporan	2	2	100%

			BIMTEK KEMANDIRIAN LOKA POM	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	784.791.000,00	783.365.784,00	99,82%	
				<u>Output :</u>					
				Jumlah laporan Bimtek Kemandirian LOKA POM	Laporan	1	1	100%	
			SOSIALISASI PROGRAM DAK BADAN POM KE KABUPATEN/KOTA	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	158.562.000,00	145.930.400,00	92,03%	
				<u>Output :</u>					
				Jumlah Dokumen DAK Non Fisik BPOM ke Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	
9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai roadmapRB BPOM 2015- 2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	PEMELIHARAAN BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	104.239.000	103.987.000	99,76%	
				<u>Output :</u>					
				Jumlah waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Bagian Evaluasi Dan Pelaporan	Bulan	12	12	100%	
			PEMELIHARAAN BAGIAN PERENCANAAN	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	78.620.000	78.620.000	100,00%	
				<u>Output :</u>					
				Jumlah waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Bagian Keuangan	Bulan	12	12	100%	
			PEMELIHARAAN BAGIAN KEUANGAN	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	72.500.000,00	71.350.000,00	98,41%	
				<u>Output :</u>					
				Jumlah waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Bagian Keuangan	Bulan	12	12	100,00%	
			PENATAAN ARSIP BIRO PERENCANAAN DAN	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	92.050.000	91.638.440	99,55%	

			KEUANGAN	<u>Output :</u>				
				Jumlah Laporan Penataan Arsip Biro Perencanaan Dan Keuangan	Laporan	2	2	100%
			PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	9.490.000	9.489.500	99,99%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Dan Keuangan Tahun 2018	Dokumen	1	1	100%
			PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2018	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	9.500.000	9.489.000	99,88%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Tahunan Biro Perencanaan Dan Keuangan Tahun 2018	Dokumen	1	1	100%
			WORKSHOP DAN BIMTEK BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	677.874.000	676.797.092	99,84%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah Laporan Peningkatan Kompetensi ASN Rorenkeu	Laporan	1	1	100%
			PEMELIHARAAN BAGIAN PENGANGGARAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	121.630.000,00	113.818.400,00	93,58%
				<u>Output :</u>				

				Jumlah waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Bagian Penganggaran	Bulan	12	12	100%
			PENATAAN ARSIP BAGIAN PENGANGGARAN	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	50.000.000,00	47.500.000,00	95,00%
				<u>Output :</u>				
				Jumlah paket penataan arsip dan surat di Bagian Penganggaran	Paket	1	1	100%
			KEPERLUAN SEHARI-HARI RORENKEU	<u>Input :</u>				
				Dana	Rp	36.000.000	35.999.300	100%
				<u>Output :</u>				
				Keperluan Sehari-Hari	Bulan	12	12	100%

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	SUB KOMPONEN	Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE	KATEGORI
				Input	Output					
1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas								
			BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN STRATEGIS	98,42%	100%	1,02	1	Efisien	0,02	Efisien
			RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	91,29%	100%	1,10	1	Efisien	0,10	Efisien
			WORKSHOP ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	99,13%	100%	1,01	1	Efisien	0,01	Efisien
			SOSIALISASI DAN BIMTEK SAKIP DAN MONEV ONLINE	97,25%	100%	1,03	1	Efisien	0,03	Efisien
2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM								
			PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERINTEGRASI	95,52%	100%	1,05	1	Efisien	0,05	Efisien
			PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN POM TAHUN 2018	99,98%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
			MONITORING DAN SUPERVISI PELAKSANAAN KEGIATAN BALAI BESAR/ BALAI	99,98%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
			MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	99,52%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan								
			KOORDINASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN LINTAS SEKTOR	99,55%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien

			INTERNALISASI KINERJA RORENKEU	97,17%	100%	1,03	1	Efisien	0,03	Efisien
			PEMANTAPAN MEKANISME PENGANGGARAN DI BB/BPOM	92,16%	96%	1,04	1	Efisien	0,04	Efisien
			PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	99,76%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM								Efisien
			PELAKSANAAN BIMTEK SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (PUSAT DAN BALAI)	93,76%	100%	1,07	1	Efisien	0,07	Efisien
			PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	98,61%	100%	1,01	1	Efisien	0,01	Efisien
			FGD PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN PNBP FUNGSIONAL BPOM	97,64%	100%	1,02	1	Efisien	0,02	Efisien
			REVIEW KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	98,77%	100%	1,01	1	Efisien	0,01	Efisien
			HONOR PENGELOLA PNBP	99,48%	100%	1,01	1	Efisien	0,01	Efisien
			REVISI PEDOMAN PENGELOLAAN PNBP	99,59%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
			INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PNBP FUNGSIONAL	99,44%	100%	1,01	1	Efisien	0,01	Efisien
			WORKSHOP LAPORAN KEUANGAN	99,55%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran								
			KOORDINASI, EVALUASI DAN VERIFIKASI TAGIHAN BELANJA BADAN POM	93,07%	100%	1,07	1	Efisien	0,07	Efisien
			PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN	93,40%	100%	1,07	1	Efisien	0,07	Efisien
			KOORDINASI LINTAS SEKTOR BAGIAN KEUANGAN	92,64%	100%	1,08	1	Efisien	0,08	Efisien
			EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN	98,04%	100%	1,02	1	Efisien	0,02	Efisien
			MONITORING KEGIATAN SATKER SEKRETARIAT UTAMA	98,31%	100%	1,02	1	Efisien	0,02	Efisien
			FGD EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN	87,63%	100%	1,14	1	Efisien	0,14	Efisien

			PENYUSUNAN JUKLAK DAN JUKNIS	98,76%	100%	1,01	1	Efisien	0,01	Efisien
			KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN	97,18%	100%	1,03	1	Efisien	0,03	Efisien
			SUPERVISI PENGANGGARAN BERSAMA INSTANSI TERKAIT	51,80%	86%	1,67	1	Efisien	0,67	Ekstrim Efisen
6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas								
			PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA BPOM	99,57%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
			INTEGRASI PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	95,21%	100%	1,05	1	Efisien	0,05	Efisien
7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu								
			REVIU GRAND DESIGN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	95,08%	100%	1,05	1	Efisien	0,05	Efisien
			REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA BPOM	96,10%	100%	1,04	1	Efisien	0,04	Efisien
			PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENSTRA BPOM 2020-2024	98,75%	100%	1,01	1	Efisien	0,01	Efisien
			PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA BPOM 2020-2024	96,93%	100%	1,03	1	Efisien	0,03	Efisien
			PERTEMUAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN	94,53%	100%	1,06	1	Efisien	0,06	Efisien
			PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2018	99,79%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
			PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BADAN POM TAHUN 2018	99,93%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
			RAPAT EVALUASI NASIONAL TAHUN 2019 DI SURABAYA	99,98%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu								
			UNIT AKUNTANSI BADAN POM	90,55%	100%	1,10	1	Efisien	0,10	Efisien

			FGD LAPORAN KEUANGAN BADAN POM	92,90%	100%	1,08	1	Efisien	0,08	Efisien
			SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL PAGU ANGGARAN	97,35%	100%	1,03	1	Efisien	0,03	Efisien
			SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL ALOKASI ANGGARAN	99,24%	100%	1,01	1	Efisien	0,01	Efisien
			PENYIAPAN BAHAN DAN PENGAWALAN RDP DENGAN MITRA KERJA BADAN POM	91,40%	100%	1,09	1	Efisien	0,09	Efisien
			KOORDINASI PENGANGGARAN DENGAN LINTAS SEKTOR	87,53%	100%	1,14	1	Efisien	0,14	Efisien
			PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) DENGAN STAKEHOLDER	91,59%	100%	1,09	1	Efisien	0,09	Efisien
			WORKSHOP PENGANGGARAN KEGIATAN TERPADU PUSAT DAN UPT BPOM	98,77%	100%	1,01	1	Efisien	0,01	Efisien
			PERTEMUAN REKONSILIASI HIBAH/PENGANGGARAN DENGAN STAKEHOLDER	97,19%	100%	1,03	1	Efisien	0,03	Efisien
			MONITORING KEGIATAN PNBP DI BALAI POM DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROGRAM PNBP 2019	75,47%	100%	1,33	1	Efisien	0,33	Efisien
			BIMTEK KEMANDIRIAN LOKA POM	99,82%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
			SOSIALISASI PROGRAM DAK BADAN POM KE KABUPATEN/KOTA	92,03%	100%	1,09	1	Efisien	0,09	Efisien
9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan								
			PEMELIHARAAN BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	99,76%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
			PEMELIHARAAN BAGIAN PERENCANAAN	100,00%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
			PEMELIHARAAN BAGIAN KEUANGAN	98,41%	100%	1,02	1	Efisien	0,02	Efisien

PENATAAN ARSIP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	99,55%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	99,99%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2018	99,88%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
WORKSHOP DAN BIMTEK BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	99,84%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien
PEMELIHARAAN BAGIAN PENGANGGARAN	93,58%	100%	1,07	1	Efisien	0,07	Efisien
PENATAAN ARSIP BAGIAN PENGANGGARAN	95,00%	100%	1,05	1	Efisien	0,05	Efisien
KEPERLUAN SEHARI-HARI RORENKEU	100,00%	100%	1,00	1	Efisien	0,00	Efisien

PENGUKURAN CAPAIAN RAPK BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET						REALISASI									
				B3	B6	B9	B12	B3			B6			B9			B12		
								a	b	Realisasi	a	b	Realisasi	a	b	Realisasi	a	b	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10 =9/8*100%	11	12	13=12/11*	14	15	16=15/14*100	17	18	19=18/17*10
Stakeholder Perspective																			
1	SK1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	-	-	-	5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.86
2	SK2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	-	-	-	72,4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.38
3	SK3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	61*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.70
4	SK4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM		WTP	WTP	WTP						WTP			WTP			WTP
5	SK5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85.25	85.25	85.25	85			93.47			93.19			95.53			96.19
Internal Perspective																			
6	SK6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM penguatan akuntabilitas	20%	40%	60%	100%			25%			43%			66.39%			100%
7	SK7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	60%	80%	80%	100%	10	6	60%	10	8.8	88%	10	9.4	94%	10	10.0	100%
8	SK8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	40%	40%	80%	100%	5	2	40%	5	2	40%	5	4	80%	5	5	100%
Learning and Growth Perspective																			
9	SK9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan keuangan				81*			-			-			-			77.35

MAPPING ANGGARAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2019

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPOM

KEGIATAN : KOORDINASI PERUMUSAN RENSTRA DAN RENCANA TAHUNAN, PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN, KEUANGAN, PELAPORAN SERTA PENGELOLAAN KINERJA DAN PELAPORAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KOMPONEN YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN	REALISASI BRUTO	REALISASI NETTO	%
1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN STRATEGIS	1,042,607,960	1,029,258,182	98.42%
			RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	526,993,600	483,642,979	91.29%
			WORKSHOP ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	657,044,165	657,044,165	99.13%
			SOSIALISASI DAN BIMTEK SAKIP DAN MONEV ONLINE	977,166,500	950,376,127	97.25%
2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERINTEGRASI	192,545,600	192,545,600	95.52%
			PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN POM TAHUN 2018	120,983,800	120,983,800	99.98%
			MONITORING DAN SUPERVISI PELAKSANAAN KEGIATAN BALAI BESAR/ BALAI	537,782,957	537,782,957	99.98%
			MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	1,194,017,750	1,194,017,750	99.52%
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	KOORDINASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN LINTAS SEKTOR	289,587,000	289,587,000	99.55%
			INTERNALISASI KINERJA RORENKEU	424,438,440	424,438,440	97.17%
			PEMANTAPAN MEKANISME PENGANGGARAN DI BB/BPOM	934,986,418	874,716,951	92.16%
			PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	112,705,000	112,705,000	99.76%
4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	PELAKSANAAN BIMTEK SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (PUSAT DAN BALAI)	346,235,306	336,949,906	93.76%
			PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	2,519,512,670	2,516,452,670	98.61%
			FGD PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN PNBPFUNGSIONAL BPOM	639,059,788	630,689,788	97.64%
			REVIEW KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	215,874,200	215,594,200	98.77%
			HONOR PENGELOLA PNBPF	176,060,000	176,060,000	99.48%
			REVISI PEDOMAN PENGELOLAAN PNBPF	371,707,797	370,935,297	99.59%
			INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PNBPFUNGSIONAL	762,141,100	762,141,100	99.44%
			WORKSHOP LAPORAN KEUANGAN	63,054,600	63,054,600	99.55%
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	KOORDINASI, EVALUASI DAN VERIFIKASI TAGIHAN BELANJA BADAN POM	557,346,281	523,733,177	93.07%

			PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN	273,408,688	273,281,088	93.40%
			KOORDINASI LINTAS SEKTOR BAGIAN KEUANGAN	26,180,000	26,180,000	92.64%
			EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN	204,785,138	204,785,138	98.04%
			MONITORING KEGIATAN SATKER SEKRETARIAT UTAMA	93,994,404	93,869,404	98.31%
			FGD EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN	177,196,126	177,196,126	87.63%
			PENYUSUNAN JUKLAK DAN JUKNIS	244,492,500	243,897,500	98.76%
			KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN	511,277,200	506,922,200	97.18%
			SUPERVISI PENGANGGARAN BERSAMA INSTANSI TERKAIT	158,527,025	154,057,025	51.80%
6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA BPOM	240,430,000	240,430,000	99.57%
			INTEGRASI PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	176,268,500	175,843,500	95.21%
7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	REVIU GRAND DESIGN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	239,030,801	239,030,801	95.08%
			REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA BPOM	385,832,100	376,832,100	96.10%
			PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENSTRA BPOM 2020-2024	746,844,045	741,870,645	98.75%
			PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA BPOM 2020-2024	1,566,931,157	1,528,755,763	96.93%
			PERTEMUAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN	455,892,832	453,692,832	94.53%
			PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2018	31,850,150	31,850,150	99.79%
			PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BADAN POM TAHUN 2018	175,394,050	175,394,050	99.93%
			RAPAT EVALUASI NASIONAL TAHUN 2019 DI SURABAYA	1,711,820,759	1,711,820,759	99.98%
8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	UNIT AKUNTANSI BADAN POM	175,094,000	175,094,000	90.55%
			FGD LAPORAN KEUANGAN BADAN POM	635,795,901	634,545,901	92.90%
			SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL PAGU ANGGARAN	1,067,222,000	1,049,482,700	97.35%
			SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL ALOKASI ANGGARAN	1,733,619,600	1,732,368,400	99.24%
			PENYIAPAN BAHAN DAN PENGAWALAN RDP DENGAN MITRA KERJA BADAN POM	151,291,000	150,908,500	91.40%
			KOORDINASI PENGANGGARAN DENGAN LINTAS SEKTOR	222,121,800	218,271,800	87.53%
			PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) DENGAN STAKEHOLDER	78,352,000	78,352,000	91.59%

			WORKSHOP PENGANGGARAN KEGIATAN TERPADU PUSAT DAN UPT BPOM	1,056,908,000	1,053,122,570	98.77%
			PERTEMUAN REKONSILIASI HIBAH/PENGANGGARAN DENGAN STAKEHOLDER	266,761,000	260,943,500	97.19%
			MONITORING KEGIATAN PNPB DI BALAI POM DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROGRAM PNPB 2019	68,000,000	56,857,000	75.47%
			BIMTEK KEMANDIRIAN LOKA POM	783,498,800	783,365,784	99.82%
			SOSIALISASI PROGRAM DAK BADAN POM KE KABUPATEN/KOTA	152,272,840	145,930,400	92.03%
9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	PEMELIHARAAN BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	103,987,000	103,987,000	99.76%
			PEMELIHARAAN BAGIAN PERENCANAAN	78,620,000	78,620,000	100.00%
			PEMELIHARAAN BAGIAN KEUANGAN	71,350,000	71,350,000	98.41%
			PENATAAN ARSIP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	91,638,440	91,638,440	99.55%
			PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9,489,500	9,489,500	99.99%
			PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2018	9,489,000	9,489,000	99.88%
			WORKSHOP DAN BIMTEK BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	676,797,092	676,797,092	99.84%
			PEMELIHARAAN BAGIAN PENGANGGARAN	113,818,400	113,818,400	93.58%
			PENATAAN ARSIP BAGIAN PENGANGGARAN	47,500,000	47,500,000	95.00%
			KEPERLUAN SEHARI-HARI RORENKEU	35,999,300	35,999,300	100.00%
			TOTAL	27,711,632,080	27,396,350,057	96.88%



www.pom.go.id



halobpom@pom.go.id



[@bpom_ri](https://www.instagram.com/bpom_ri)

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN